

**ANALISIS FUNGSI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG DAN  
BELANJA TIDAK LANGSUNG SEBAGAI ALAT PENILAIAN  
KINERJA PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA  
MINERAL PROVINSI SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



Oleh

Nama : Mega Aulia  
NPM : 1405170691  
Program studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

**MEMUTUSKAN**

Nama : MEGA AULIA  
N P M : 1405170691  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS FUNGSI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SEBAGAI ALAT PENILAIAN KINERJA PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA UTARA  
Dinyatakan : (C/B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**

Pengji I

SYAFRIDA HANI, S.E., M.Si

Pengji II

M. IDRIS DALIMUNTE, S.E., M.Si

Pembimbing

Dra. FATMAWARNI, MM

**PANITIA UJIAN**

Ketua

H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : MEGA AULIA  
N.P.M : 1405170691  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN  
Judul Skripsi : ANALISIS FUNGSI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG  
DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SEBAGAI ALAT  
PENILAIAN KINERJA PADA DINAS ENERGI DAN  
SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA  
UTARA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(Dra. FATMAWARNI, MM)

Diketahui/Disetujui  
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

## **ABSTRAK**

**Mega Aulia. NPM. 1405170691. Analisis Fungsi Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Sebagai Alat Penilaian Kinerja Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara, 2018. Skripsi.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah fungsi anggaran pada belanja langsung dan belanja tidak langsung sudah efisien dalam penilaian kinerja yang terdapat di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan deskriptif dengan jenis data kuantitatif. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi dan wawancara karena data dalam penelitian merupakan data primer didapat dari sumber pertama yang merupakan data mentah yang kelak akan diproses untuk tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran belanja daerah tahun 2013-2016. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam penilaian kinerja secara keseluruhan sudah diolah secara efisien akan tetapi hanya sebagian saja yang terlihat efisien.

**Kata Kunci :** Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, Kinerja

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'alaikum wr.wb,*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang maha pengasih, maha sempurna, maha pemberi petunjuk yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik serta shalawat pengiring salam penulis sampaikan keharibaan junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang mengantarkan umat manusia dari zaman kebodohan sampai ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini

Adapun judul skripsi yang penulis pilih adalah Analisis Fungsi Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Sebagai Alat Penilaian Kinerja Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara. Proposal ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Strata I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan tepat waktu.

Penulis juga menyadari menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya yang tak terhingga kepada ayahanda Pamuji Anto dan ibunda Bariyah. Dan terima kasih kepada

semua pihak yang terkait dan turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.A.P, Selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri S.E., MM., M.Si, Selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Ibu Fitriani Saragih SE, M.Si dan Ibu Zulia Hanum SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Program Studi dan sekretaris program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dra Fatmawarni.,M.M, Selaku dosen pembimbing saya yang telah dengan sabar meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan selaku staf pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan.
6. Kepada abang dan kakak tercinta Abdi purnama Nugraha, Rizky Irfandi, Restika Primayani, dan Winda Fitri Tri Asti, dan tidak lupa pula kepada sepupu Dinda Amalia serta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan kepada penulis baik secara moril maupun materil, semangat, kasih sayang dan kesabaran doa restunya hingga terselesaikannya skripsi ini.

7. Terima kasih kepada Bapak Ir. Zubaidi, M.Si selaku kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan seluruh pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan riset.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan teruntuk pada kelas Akuntansi E pagi dan siang stambuk 2014: Ade Kartika Damanik, Cahyu, Eki Pratiwi, Artika Dewi, Mustika, Hijrah Nopriyanti Simamora, Riska Fadhilla Nst, Sarmida Fitri, Nurhayati, Desi Purnama Sari, Suci Ayuning Tyas, Sari Wulandari yang telah membantu dan memberi dukungan baik secara moril maupun materil.
9. Kepada sahabat tercinta Eki Fitriani, Elma Fiana Tanjung dan Intan Khairani yang telah memberikan dukungan, semangat dan doa hingga terselesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk menambah wawasan bagi para pembaca dan bagi penulis khususnya demi kemajuan perkembangan ilmu pendidikan. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

**Medan, Maret 2018**  
**Penulis**

**MEGA AULIA**  
**1405170691**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	6
1.3 Batasan Masalah.....	6
1.4 Rumusan Masalah .....	7
1.5 Tujuan Penelitian .....	7
1.6 Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>9</b>
2.1 Kajian Teoritis.....	9
2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik.....	9
2.1.2 Pengertian dan Manfaat Standar Akuntansi Pemerintah .....	9
2.1.2.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah.....	9
2.1.2.2 Manfaat Standar Akuntansi Pemerintah .....	10
2.2 Pengertian Basis Akuntansi .....	11
2.3 Pengertian dan Fungsi Anggaran Sektor Publik .....	12
2.3.1 Pengertian Anggaran Sektor Publik .....	12
2.3.2 Fungsi Anggaran Sektor Publik .....	14
2.4 Laporan Keuangan Pemerintah .....	15



2.4.1 Laporan Keuangan Pemerintah .....	15
2.5 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Kedudukan Belanja Daerah dalam APBD.....	19
2.5.1 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah .....	19
2.5.2 Kedudukan Belanja Daerah.....	20
2.6 Pengertian Belanja dan Pembagian Belanja Daerah .....	20
2.6.1 Pengertian Belanja.....	20
2.6.2 Pembagian Belanja Daerah .....	21
2.7 Efisiensi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.....	23
2.8 Pengertian Kinerja.....	25
2.9 Penelitian Terdahulu .....	26
2.10 Kerangka Konseptual .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	30
3.2 Definisi Operasional.....	30
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian .....	31
3.3.1 Tempat Penelitian.....	31
3.3.2 Waktu Penelitian .....	31
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	32
3.4.1 Jenis Data .....	32
3.4.2 Sumber Data .....	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.6 Teknik Analisis Data.....	34

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
4.1. Hasil Penelitian .....	36
4.1.1. Sejarah Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral.....	36
4.1.2. Analisis Anggaran Belanja Langsung Tahun 2013-2016.....	37
4.1.3. Analisis Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2013-2016 .....	54
4.1.4. Fungsi Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Sebagai Alat Penilaian Kinerja .....	59
4.2 Pembahasan.....	60
4.2.1 Analisis Laporan Realisasi Anggaran Belanja .....	60
4.2.2 Analisis Tingkat Efisiensi Belanja Langsung .....	61
4.2.3 Analisis Tingkat Efisiensi Belanja Tidak Langsung .....	63
4.2.4 Analisis Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung Dalam Menilai Kinerja .....	64
 <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1. Kesimpulan .....	66
5.2. Saran .....	67
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
 <b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.I Kerangka Konseptual .....	30
---------------------------------------	----

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Tabulasi Data .....	3
Tabel III.1 Tabel Waktu Penelitian.....	32
Tabel III.2 Kisi-Kisi Wawancara .....	34
Tabel IV.1 Tabel Uraian Belanja Pegawai Tahun 2013 .....	37
Tabel IV.2 Tabel Uraian Belanja Pegawai Tahun 2014 .....	38
Tabel IV.3 Tabel Uraian Belanja Pegawai Tahun 2015 .....	39
Tabel IV.4 Tabel Uraian Belanja Pegawai Tahun 2016 .....	40
Tabel IV.5 Tabel Uraian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2013 .....	41
Tabel IV.6 Tabel Uraian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2014 .....	43
Tabel IV.7 Tabel Uraian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2015 .....	45
Tabel IV.8 Tabel Uraian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2016 .....	47
Tabel IV.9 Tabel Uraian Belanja Modal Tahun 2013.....	48
Tabel IV.10 Tabel Uraian Belanja Modal Tahun 2014.....	49
Tabel IV.11 Tabel Uraian Belanja Modal Tahun 2015.....	51
Tabel IV.12 Tabel Uraian Belanja Modal Tahun 2016.....	52
Tabel IV.13 Tabel Belanja Tidak Langsung Tahun 2013.....	54
Tabel IV.14 Tabel Belanja Tidak Langsung Tahun 2014.....	55
Tabel IV.15 Tabel Belanja Tidak Langsung Tahun 2015.....	56
Tabel IV.16 Tabel Belanja Tidak Langsung Tahun 2016.....	58
Tabel IV.17 Tabel Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2013-2016 .....	60
Tabel IV.18 Tabel Realisasi Belanja Langsung Tahun 2013-2016 .....	62

Tabel IV.19 Tabel Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2013-2016..... 63

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang Masalah**

Akuntansi sektor publik merupakan sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia dan departemen-departemen dibawahnya dengan tujuan sebagai salah satu alat pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Pada saat ini sektor publik dituntut untuk memperhatikan kualitas dan profesionalisme dan lebih memperhatikan *value for money*.

Reformasi sektor publik yang disertai dengan adanya tuntutan demokrasi menjadi salah satu fenomena global di Indonesia. Tuntutan demokrasi menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas.

Tuntutan baru yang munculnya akuntabilitas dalam organisasi sektor publik harus memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktifitasnya. yang dimaksud dengan *value for money* adalah ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan-penggunaan sumber daya alam artinya penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing cost*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Dengan adanya tuntutan pemerintah harus membuat suatu sistem terhadap anggaran yang dikeluarkan dengan baik dan efisien. Sistem anggaran pemerintah dalam perkembangannya telah menjadi instrumen kebijakan multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Hal tersebut terutama tercermin pada komposisi dan besarnya anggaran yang secara langsung.

merefleksikan arah dan tujuan pelayanan masyarakat yang diharapkan. Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus dapat digunakan sebagai alat penilaian kinerja. Agar fungsi perencanaan dan anggaran sebagai alat penilaian kinerja dapat berjalan dengan baik, maka sistem anggaran serta pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis.

Salah satu bentuk berjalan dengan baik dan efisien nya suatu anggaran pemerintah maka harus ada teknik anggaran kinerja agar menghasilkan suatu target yang dicapai dengan baik. Dimana teknik anggaran kinerja mendominasi pemerintah agar dapat diawasi dan dikendalikan melalui penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan suatu program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut.

Dengan adanya penerapan sistem anggaran tersebut pemerintah tidak akan boros dalam penggunaan dana. Salah satu cara penerapan dalam menggunakan dana pemerintah adalah menganalisis fungsi anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung sebagai alat penilaian kinerja. Dengan analisis tersebut, maka akan dapat mengetahui berapa besar anggaran belanja yang dikeluarkan pemerintah dan apakah sudah efisien atau belum penerapan fungsi anggarannya. Akan tetapi jumlah belanja yang besar tersebut terjadi bukan karena semata-mata efisiensi pada pengelolaan belanja daerah yang besar tetapi lebih menunjukkan pengelolaan dan penerapan yang belum efisien didalamnya, salah satunya ada program atau kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Dengan pernyataan tersebut penulis akan membuat suatu tabel data bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam penerapan fungsi anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung belum dikatakan efisien.

**Tabel I.I**  
**Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung**

Tahun	Output	Input	%	Tahun	Output	Input	%
	Target Anggaran Belanja Langsung	Realisasi Belanja Langsung			Target Anggaran Belanja Tidak langsung	Realisasi Belanja Tidak Langsung	
2013	5.501.125.650	5.442.103.150	98,93	2013	11.151.503.254	8.285.543.930	74,30
2014	14.410.828.220	13.492.278.850	93,63	2014	9.538.327.000	8.384.762.444	87,91
2015	17.691.655.000	16.614.478.470	93,91	2015	9.356.520.000	8.707.397.933	93,06
2016	14.378.579.150	14.035.128.600	97,61	2016	10.129.437.000	9.000.866.138	88,86

Sumber: Data Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2013-2016.

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa output atau target realisasi belanja langsung mengalami kenaikan selama tiga tahun yaitu pada tahun 2013 sampai 2015 sedangkan pada tahun 2016 output atau target realisasi belanja mengalami penurunan. Kemudian dilihat dari sisi input atau realisasi belanjanya juga mengalami kenaikan pada tahun 2013 sampai 2015 sedangkan pada tahun 2016 input atau realisasi anggaran belanjanya mengalami penurunan. Hal ini dapat dikatakan bahwa output maupun input pada belanja langsung mengalami naik turun atau berfluktuasi. Dapat kita lihat juga bahwa pada belanja langsung tingkat efisiensi mengalami naik turun. Dimana pada tahun 2013 tingkat efisiensi sebesar 98,93% dan pada tahun 2014 sebesar 93,63% berarti tingkat efisiensi mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 2014 tingkat efisiensi sebesar 93,63% dan pada tahun 2015 sebesar 93,91% berarti tingkat efisiensi mengalami kenaikan. Dan sedangkan pada tahun 2015 ke tahun 2016 tingkat efisiensi mengalami kenaikan dimana tingkat efisiensi pada tahun 2015 sebesar 93,91% dan pada tahun 2016



sebesar 97,61%. Maka hal ini dapat kita lihat pada tabel data diatas bahwa setiap tahunnya tingkat efisiensi pada belanja langsung terjadi naik turun dan hasil tingkat efisiensi belanja langsung belum dikatakan efisien akibatnya suatu kinerja suatu pemerintahan dapat dikatakan belum baik dan efisien karena hasil tingkat efisiensi belanja langsung diatas 90%. Sedangkan menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 mengatakan bahwa apabila belanja dapat dikategorikan sangat efisien jika hasil efisiensinya mencapai dibawah 60% semakin kecil tingkat efisiensi belanja langsung maka kinerja di pemerintahan tersebut semakin baik dan efisien.

Dapat juga dilihat dari sisi realisasi anggaran belanja tidak langsung bahwa output atau target realisasi belanja tidak langsung juga mengalami naik turun. Dimana pada tahun 2013 sampai 2015 output mengalami kenaikan dan pada tahun 2016 output mengalami penurunan. Dapat dilihat juga dari tingkat efisiensi pada belanja tidak langsung juga mengalami naik turun. Dimana pada tahun 2013 adalah 74,30% dan pada tahun 2014 sebesar 87,91% tingkat efisiensi mengalami kenaikan, hal ini dapat dikatakan realisasi anggaran belanja tidak langsung pada tahun 2013 dan 2014 sudah dikatakan efisien. Sedangkan pada tahun 2014 sebesar 87,91% dan pada tahun 2015 sebesar 93,06% tingkat efisiensi mengalami kenaikan, hal tersebut dapat dikatakan bahwa realisasi anggaran belanja tidak langsung belum efisien pada tahun 2015. Dan sedangkan pada tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami penurunan tingkat efisiensinya karena pada tahun 2015 tingkat efisiensinya sebesar 93,06% dan pada tahun 2016 sebesar 88,86%. Pada tahun 2016 tingkat efisiensinya mengalami penurunan dikarenakan target pencapaian belanja tidak langsung dan hasil realisasi belanjanya itu besar sehingga

menghasilkan tingkat persentasinya rendah akan tetapi belanja tidak langsung sudah dikatakan efisien. Maka hal ini dapat dikatakan bahwa dinas energi dan sumber daya mineral dalam realisasi anggaran belanja tidak langsung belum dikatakan efisien pada tahun 2015 dan kinerja suatu pemerintahan juga dapat dikatakan belum baik dan efisien.

Dari penjelasan di atas bahwa Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan penerapan realisasi anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dapat dikatakan tidak efisien dikarenakan tingkat persentasinya di atas 90%. Maka dari itu untuk membuktikan hal tersebut dikaitkan dengan kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 yaitu jika hasil perbandingan antara 90%-100% maka anggaran belanja dapat dikatakan tidak efisien.

Walaupun jumlah belanja yang dimiliki pada dinas tersebut besar akan tetapi hal tersebut bukan karena semata-mata efisiensi pada pengelolaan belanja daerah yang besar tetapi lebih menunjukkan bahwa pengelolaan dan penerapan yang belum efisien di dalamnya, salah satunya ada program atau kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Penerapan sistem anggaran merupakan suatu cara yang baik diterapkan oleh sektor publik karena dapat mengurangi pemborosan biaya dan dapat menyusun program atau kegiatan yang lebih akurat sehingga dapat terarah mengenai biaya atau belanja apa saja yang untuk dikeluarkan. Dengan ini dinas energi dan sumber daya mineral dapat dikatakan efisien dalam penerapan fungsi anggaran belanjanya.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas serta mengingat pentingnya penerapan sistem anggaran yang digunakan untuk mencapai target yang diinginkan tercapai dengan baik dan efisien,maka penulis memilih judul “**Analisis Fungsi Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Sebagai Alat Penilaian Kinerja Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara**”.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dipergunakan untuk mengenal dengan jelas permasalahan yang akan dikaji dalam suatu penelitian.Berdasarkan kegunaan dari identifikasi masalah dalam suatu penelitian tersebut,maka ditetapkan identifikasi masalah penelitian ini adalah :

1. Fungsi anggaran yang digunakan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara masih belum dikatakan baik dan efisien dikarenakan tingkat efisien diatas 90%
2. Tingkat efisiensi anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung mengalami naik turun yang akan mempengaruhi suatu kinerja.

### **1.3 Batasan Masalah**

1. Dalam melakukan penelitian ini,penulis mempunyai keterbatasan waktu dan pengetahuan.Sehingga penulis membatasi permasalahan hanya pada ruang lingkup yang berhubungan dengan fungsi anggaran pada belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan menggunakan fungsi anggaran sebagai alat penilaian kinerja Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang digunakan oleh peneliti adalah:

1. Mengapa fungsi anggaran belanja langsung pada tahun 2013-2016 tidak efisien dan fungsi anggaran belanja tidak langsung pada tahun 2015 tidak efisien?
2. Bagaimana sistem kinerja yang ada terhadap anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara?

#### **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengapa fungsi anggaran belanja langsung pada tahun 2013-2016 tidak efisien dan mengapa fungsi anggaran belanja tidak langsung tahun 2015 tidak efisien Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui bagaimana sistem kinerja yang ada Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara terhadap anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung.

##### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi peneliti yaitu untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan mengenai analisis penerapan realisasi anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung.

2. Bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagai sumbangan informasi mengenai hal-hal yang perlu dibenahi manajemen yang berkaitan dengan analisis penerapan realisasi anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dimasa yang akan datang.
3. Bagi pihak akademik, yaitu sebagai referensi informasi bagi pihak peneliti lain yang ingin melakukan penelitian serupa bidang akuntansi.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

### **A. Kajian Teoritis**

#### **2.1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik**

Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan social, maupun proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta.

Menurut Mardiasmo (2012, Hal.5) mengatakan bahwa akuntansi sektor publik merupakan manajemen keuangan yang sumbernya berasal dari publik sehingga menimbulkan konsekuensi untuk dipertanggungjawabkan kepada publik sehingga dalam pengelolaannya memerlukan keterbukaan dan akuntabilitas terhadap publik.

Menurut Muindro (2013, Hal.1) mengatakan bahwa akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik.

#### **2.1.2 Pengertian, dan Manfaat Standar Akuntansi Pemerintahan**

##### **2.1.2.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan**

Standar akuntansi pemerintahan merupakan salah satu aspek penting yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara dan pelaporan keuangan pemerintah. Terdapat banyak pihak yang berkepentingan dengan standar akuntansi pemerintahan antara lain penyajian laporan keuangan, auditor,

masyarakat pengguna laporan keuangan, organisasi profesi akuntansi, akademis, dan pemerintah. Standar akuntansi perlu dikembangkan untuk memperbaiki praktik akuntansi keuangan pada lingkungan pemerintahan. Standar akuntansi sektor publik adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi sektor publik.

Menurut PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa akuntansi adalah proses, identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.

Standar akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pada organisasi pemerintahan (Mahmudi, 2010:46).

#### **2.1.2.2 Manfaat Standar Akuntansi Pemerintahan**

Berikut ini adalah manfaat dari standar akuntansi pemerintahan :

- a. Standar akuntansi digunakan oleh akuntan keuangan dipemerintahan sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan.
- b. Standar akuntansi yang digunakan oleh auditor sebagai kriteria audit untuk menentukan apakah laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang mengaturnya.
- c. Standar akuntansi digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk memahami laporan keuangan dan menghindari kesalahan dalam menginterpretasikan informasi dalam laporan keuangan.

- d. Standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan.
- e. Standar akuntansi menjadi acuan dalam penyusunan sistem akuntansi seba keluaran sistem akuntansi harus sesuai dengan standar.

## **2.2. Pengertian Basis Akuntansi**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintahan yaitu basis akrual. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan laporan realisasi anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

Basis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan pendapatan diakui pada saat hak telah diperoleh (*earned*) dan beban (belanja) diakui pada saat kewajiban timbul atau sumber daya dikonsumsi.

Menurut PP No.71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan basis akuntansi (Pasal 1 ayat 8-9) terbagi atas: SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBN/APBD. SAP berbasis kas



menuju akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual.

### **2.3. Pengertian dan Fungsi Anggaran Sektor Publik**

#### **2.3.1. Pengertian Anggaran Sektor Publik**

Anggaran merupakan pernyataan mengenai setimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi. Dalam organisasi sektor publik penganggaran merupakan suatu proses politik. Hal ini berbeda dengan sektor swasta yang relatif lebih kecil nuansa politiknya karena anggaran merupakan bagian dari rahasia suatu perusahaan yang tertutup bagi publik, namun pada sektor publik anggaran merupakan hal yang harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas dan pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan menggunakan uang publik.

Penganggaran pada sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategik dilakukan. Anggaran merupakan artikulasi dari perumusan dan perencanaan strategi yang dibuat. Aspek-aspek yang harus dicakup dalam anggaran sektor publik :

- a. Aspek Perencanaan
- b. Aspek Pengendalian
- c. Aspek Akuntabilitas

Menurut Freeman (2003,Hal.19), Anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (*the process of alloocating resources to unlimited demands*). Pengertian tersebut mengungkap peran strategis anggaran dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik.

Menurut *The National Committee On Govermental Accounting* (NCGA), (Muindro,2013,Hal.137) : “ *A budget is plan of financial operation embodying an estimated of proposed expenditures for given period of time an the peroposed means of financial them* “

Dari definisi diatas,dapat dipastikan bahwa anggaran negara meliputi :

1. Rencana pengeluaran/belanja
2. Rencana penerimaan/pembiayaan belanja
3. Mencakup jangka waktu tertentu

Pengertian anggaran atau APBN menurut UU No.17/2003 sebagai berikut:  
“Anggaran pendapatan belanja negara selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat (DPR), dan anggaran pendapatan belanja daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah”

### 2.3.2. Fungsi Anggaran Sektor Publik

Menurut Eka (2015) anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama yaitu :

1. Anggaran sebagai alat perencanaan

Dengan adanya anggaran, organisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan kerah mana kebijakan yang dibuat.

2. Anggaran sebagai alat pengendalian

Dengan adanya anggaran, organisasi sektor publik dapat menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar (*overspending*) atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya (*Misspending*)

3. Anggaran sebagai alat kebijakan

Melalui anggaran, organisasi sektor publik dapat menentukan arah atas kebijakan tertentu.

4. Anggaran sebagai alat politik

Dalam organisasi sektor publik, komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan dapat dilihat melalui anggaran.

5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi

Melalui dokumen anggaran yang komprehensif, sebuah bagian, unit kerja, atau departemen yang merupakan suborganisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan juga apa yang akan dilakukan oleh bagian/unit kerja lainnya.

#### 6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja

Anggaran adalah suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu bagian/unit kerja telah memenuhi target, baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya.

#### 7. Anggaran sebagai alat motivasi

Anggaran dapat digunakan sebagai alat komunikasi dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian. Dengan catatan, anggaran akan menjadi alat motivasi yang baik jika memenuhi sifat “menantang tetapi masih mungkin untuk dicapai”. Maksudnya adalah suatu anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah dicapai.

#### 8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan suatu ruang publik (*Public Sphere*). Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR/MPR. Masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dan berbagai Organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam penganggaran publik.

## **2.4 Laporan Keuangan Pemerintah**

### **2.4.1 Laporan Keuangan Pemerintah**

Menurut PP No.71 tahun 2010, komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

Komponen laporan keuangan pemerintah:

#### 1. Laporan Realisasi Anggaran

2.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

3.Neraca

4.Laporan Arus Kas

5.Laporan Operasional

6.Laporan Perubahan Ekuitas

7.Catatan atas Laporan Keuangan.

#### 1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran merupakan kegiatan-kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintahan pusat/daerah dalam satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus/defisit-LRA
- e. Pembiayaan
- f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

## 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut :

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
- c. Sisa lebih/Kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan
- d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan lain-lain.
- e. Saldo Anggaran Lebih Akhir

## 3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

Setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan.

## 4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

## 5. Laporan Operasional

Laporan finansial mencakup menyajikan pos-pos sebagai berikut :

1. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional
2. Beban dari kegiatan operasional
3. Surplus/Defisit dari kegiatan Non operasional, bila ada
4. Pos luar biasa, bila ada
5. Surplus/defisit

## 6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos :

1. Ekuitas Awal
2. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan
3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.
4. Ekuitas Akhir.

## 7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Informasi Umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi
2. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro
3. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

4. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
5. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan; Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

## **2.5. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Kedudukan Belanja Daerah dalam APBD**

### **2.5.1 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah**

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pemborosan sumber daya, meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian, serta harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Hal ini merupakan tuntutan dari fungsi alokasi dan fungsi distribusi APBD.

Menurut Halim (2012) mengatakan bahwa APBD merupakan rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan beban yang merupakan batas maksimal untuk suatu periode anggaran.

Menurut keputusan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah ada 25 urusan wajib dan 8 urusan pilihan pemerintahan daerah. Klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup



pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruangan, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, dan lain-lain. Sedangkan klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

### **2.5.2. Kedudukan Belanja Daerah dalam APBD**

Dibawah ini adalah merupakan Kedudukan belanja dalam APBD yaitu :

1. Merupakan kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
2. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan anggaran serta berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas aktifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran yang dimaksud.
3. Penyusunan belanja diprioritaskan untuk menjunjung efektifitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi tanggung jawab.

## **2.6. Pengertian Belanja dan Pembagian Belanja Daerah**

### **2.6.1. Pengertian Belanja**

Belanja adalah pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Menurut Indra Bastian (2002,Hal.54) Belanja atau biaya diakui dalam laporan keuangan kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban yang telah terjadi dan apabila pengukurannya dapat diuji serta bebas dari bias.Dengan demikian pengakuan belanja/biaya terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aktiva.

Menurut Indra Bastian (2006,Hal.151) Belanja adalah jenis biaya yang timbulnya berdampak langsung terhadap berkurangnya saldo kas maupun uang entitas yang berada di bank.

### **2.6.2. Pembagian Belanja Daerah**

Belanja Daerah dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu :

#### **1. Belanja Langsung**

Belanja langsung adalah merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dari suatu kegiatan terdiri dari atas belanja :

- a) Belanja Pegawai (Honorarium/Upah)
- b) Belanja Barang dan Jasa
- c) Belanja Modal

Menurut Mahmudi (2007) belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan baik program maupun kegiatan (aktifitas).

Belanja Langsung Menurut Jenis Belanja Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan tahun 2011 tentang perubahan kedua, belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang

terdiri atas belanja pegawai yang dimaksudkan dengan pengeluaran honorarium/Upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah seperti belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa. Dimana belanja langsung terdiri dari :

- a) Belanja pegawai merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orang atau personal yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau dengan kata lain merupakan biaya tetap pegawai.
- b) Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
- c) Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan dapat menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Menurut Halim (2012, Hal. 107) Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal termasuk :
  1. Belanja Tanah
  2. Belanja Peralatan dan Mesin
  3. Belanja Modal, Gedung, dan Bangunan
  4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
  5. Belanja Aset Tetap Lainnya
  6. Belanja Aset Lainnya.

## 2. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung adalah merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung terdiri dari atas belanja :

- a) Belanja Pegawai
- b) Belanja Bunga
- c) Belanja Hibah
- d) Belanja Subsidi
- e) Belanja Bantuan Sosial
- f) Belanja bagi hasil
- g) Bantuan keuangan
- h) Belanja tidak terduga

### **2.7. Efisiensi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung**

Efisiensi merupakan pencapaian keluaran (output) yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan tertentu untuk mencapai keluaran tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan keluaran/masukan (output/input) yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang ditetapkan.

Menurut Mardiasmo (2002, Hal.17) Efisiensi adalah hubungan yang erat dengan konsep produktivitas dimana pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input yang serendah-rendahnya atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output yang sebesar-besarnya.

Menurut Mahmudi (2007) Dalam Rusita Untari tahun 2011 mengatakan bahwa efisiensi adalah analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja.

Jadi, Efisiensi merupakan analisis untuk mengukur pertumbuhan belanja baik untuk mengukur pertumbuhan belanja langsung maupun belanja tidak langsung dengan maksud untuk mencapai suatu target yang diinginkan.

Untuk mengukur pertumbuhan belanja baik pada belanja langsung maupun belanja tidak langsung yaitu mengukur tingkat efisiensi dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung maupun belanja tidak langsung dengan total anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Input}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Dimana input merupakan realisasi anggaran belanja langsung dan tidak langsung. Sedangkan Output merupakan target anggaran belanja langsung maupun tidak langsung.

Berikut adalah merupakan kriteria hasil perhitungan dari efisiensi realisasi anggaran belanja Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, Kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut :

- 1) Jika hasil perbandingan lebih dari 100% maka anggaran belanja dapat dikatakan tidak efisien.
- 2) Jika pencapaian antara 90% - 100% maka anggaran belanja dapat dikatakan kurang efisien.
- 3) Jika pencapaian antara 80% - 90% maka anggaran belanja dapat dikatakan cukup efisien.

- 4) Jika pencapaian antara 60% - 80% maka anggaran belanja dapat dikatakan efisien.
- 5) Jika pencapaian dibawah 60% maka anggaran belanja dapat dikatakan sangat efisien.

## **2.8. Pengertian Kinerja**

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran,tujuan,misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi.

Kinerja menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis,efisien,dan efektif. Pengukuran kinerja suatu pemerintah lebih ditekankan pada kemampuan instansi pemerintah dalam menyerap anggaran.

Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai suatu pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan,sasaran,dan srategi. Namun karena sifat dan karakteristik organisasi sektor publik berbeda dengan sektor swasta,penekanan dan orientasi pengukuran kinerjanya pun terdapat perbedaan.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji suatu penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian yang dilakukan oleh penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian penulis.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama peneliti/Tahun	Judul	Tujuan	Metode penelitian	Hasil Penelitian
1	Rusita Untari (2011)	Analisis efesiensi dan Efektivitas pelaksanaan realisasi anggaran belanja langsung di dinas pendidikan kota semarang	Untuk menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi pada pelaksanaan realisasi anggaran belanja langsung tahun 2011-2014 di SKPD Dinas Pendidikan Kota Semarang	Metode Deskriptif	Dinas Pendidikan Kota Semarang Pada tahun anggaran 2011-2014 menggambarkan bahwa realisasi anggaran sudah efisien dan efektif akan tetapi lebih menunjukkan pengelolaan keuangan daerah nya yang belum efektif salah satunya karena ada program yang tidak dapat

					dilaksanakan pada tahun anggaran yang bersangkutan
2	Ariel Sharon Sumenge	Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja badan perencanaan pembangunan daerah (BAPEDA) Minahasa Selatan	Untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja badan perencanaan pembangunan daerah (BAPEDA) Minahasa Selatan	Metode analisis deskriptif	Pelaksanaan anggaran belanja pada tahun 2008-2012 sudah efektif akan tetapi pada tahun 2011 tingkat efektifitas masih kurang karena realisasi anggaran belanja memiliki perbedaan yang jauh dengan target anggaran belanja. perbedaan ini terjadi karena ada beberapa kegiatan yang dianggarkan akan tetapi tidak dilaksanakan
3	Sri Devi Octaviani (2009)	Analisis komposisi belanja langsung dan belanja tidak langsung Pada Pemerintah Kabupaten Langkat	Untuk mengetahui pengalokasian belanja langsung dan belanja tidak langsung dan besarnya pengalokasian belanja tersebut Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat	Metode Deskriptif	Komposisi pengalokasian belanja langsung dan belanja tidak langsung pada pemerintah kabupaten langkat tidak memenuhi syarat



4	Immanuel Pangkey dan Sharly Pinatik (2015)	Analisis efektivitas dan efisiensi anggaran belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan	Untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi anggaran belanja daerah Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara.	Metode Deskriptif	Periode anggaran belanja pada tahun 2010-2014 penggunaan anggaran belanja langsung keseluruhan tidak efektif dan tidak efisien karena anggaran tidak sesuai dengan target
5.	Retno Sundari (2013)	Analisis pengaruh belanja langsung terhadap capaian kinerja instansi pemerintah	Untuk mengetahui apakah belanja langsung berpengaruh atau tidak terhadap capaian kinerja	Metode deskriptif	Bahwa belanja langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap capaian kinerja.

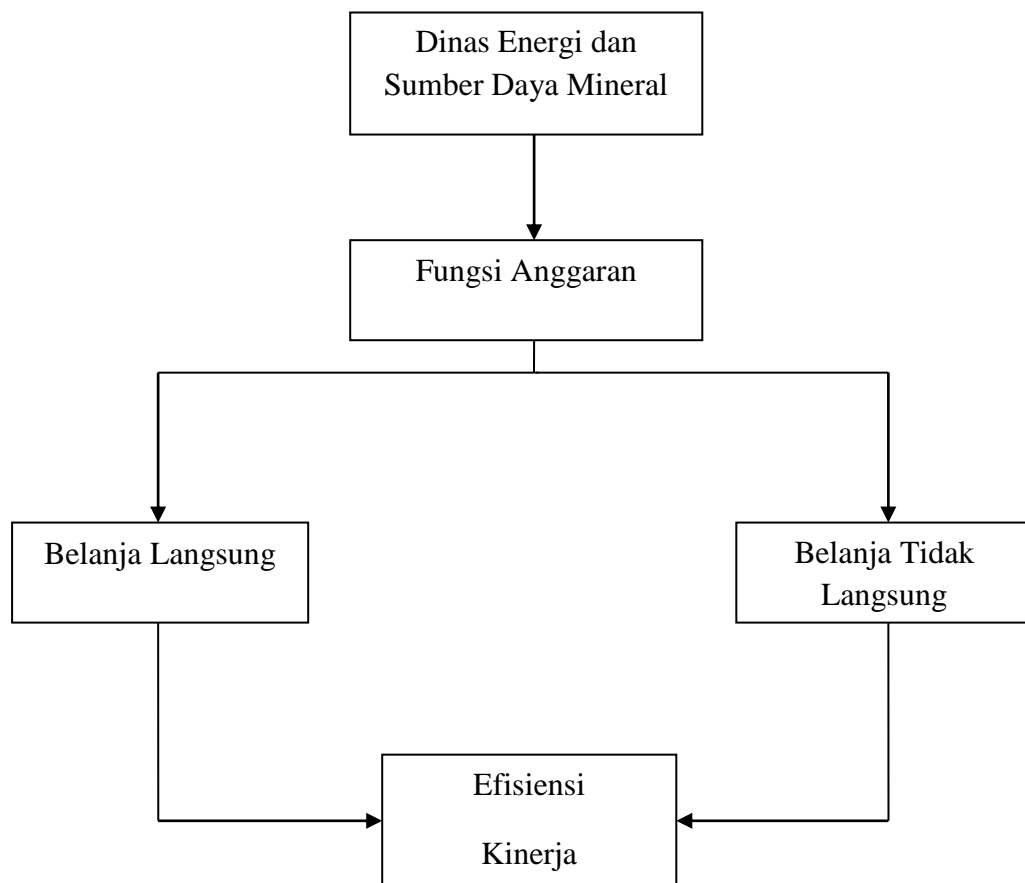
## 2.9.Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan sintesis atau ekstrapolasi dari kejadian teori yang mencerminkan keterkaitan antar variabel yang diteliti dan merupakan tuntunan untuk memecahkan masalah penelitian dan merupakan tempat peneliti memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variabel atau masalah yang ada dalam penelitian.

Pada dinas energi dan sumber daya mineral dalam menyusun suatu anggaran memerlukan sistem anggaran dalam pencatatan, penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis. Dimana dengan adanya fungsi anggaran yang diterapkan maka dapat berjalan dengan baik kemana anggaran

yang dikeluarkan dan dapat terarah berapa besar anggaran yang dikeluarkan. Fungsi anggaran sebagai alat penilaian kinerja merupakan suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu bagian/unit kerja yang telah memenuhi target, baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya.

Fungsi anggaran akan berkaitan dengan belanja langsung dan belanja tidak langsung yang akan terlihat suatu tolok ukur apakah suatu target yang diinginkan tercapai dengan baik dan efisien dan apakah suatu kinerja yang dicapai sudah baik dan efisien apa belum.



**Gambar II.I**  
**Kerangka Berfikir**

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan data, merumuskan, mengklasifikasikan serta menginterpretasikan sehingga memberikan gambaran atau keterangan yang jelas mengenai suatu masalah yang dihadapi. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat suatu deskriptif, gambaran, atau lukisan secara sistematis, aktual mengenai fakta-fakta dan fenomena yang ada.

### **3.2 Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional dikemukakan dengan tujuan untuk melihat sejauh mana pemahaman dalam penelitian dan untuk mengoperasionalkan variabel dalam bentuk ukuran-ukuran dari variabel peneliti. Dalam penelitian ini dapat ditarik suatu definisi operasional yaitu Fungsi anggaran sebagai alat ukur, Belanja langsung dan Belanja tidak langsung sebagai variabel.

Fungsi anggaran adalah suatu ukuran yang bisa menjadi patokan atau tolok ukur apakah suatu bagian/unit kerja yang telah memenuhi suatu target, baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya.

Adapun Variabel yang digunakan penulis sebagai berikut:

#### **1. Belanja Langsung**

Belanja langsung adalah merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Besar kecilnya belanja dipengaruhi secara langsung oleh adanya kegiatan. Semakin banyak volume

kegiatan maka akan semakin meningkat belanjanya. Belanja langsung juga dapat dihubungkan secara langsung dengan kegiatan. Keberadaan anggaran belanja langsung merupakan konsekuensi karena adanya suatu program atau kegiatan daerah.

## 2. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung adalah merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung juga dapat dihubungkan dengan suatu kegiatan atau program. Dengan adanya keberadaan anggaran belanja tidak langsung merupakan konsekuensi karena adanya suatu program atau kegiatan daerah.

### **3.3 Tempat dan Waktu Penelitian**

#### 3.3.1. Tempat penelitian

Tempat dilakukannya penelitian adalah Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara yang beralamat Jalan Setia Budi Pasar II No.84 Tanjung Sari

#### 3.3.2. Waktu Penelitian

Waktu dalam penelitian ini dilakukan pada bulan November 2017 sampai dengan Maret 2018.

**Tabel III.I**  
**Jadwal Penelitian**

N O	Kegiatan	BULAN																							
		November				Desember				Januari				Februari				Maret							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Kunjungan ke perusahaan	■	■																						
2	Pengajuan Judul			■	■	■	■																		
3	Penulisan dan Bimbingan Proposal							■	■	■	■														
4	Seminar Proposal													■	■										
6	Pengumpulan Data															■									
7	Pengolahan dan Analisis Data																	■	■	■					
8	Penyusunan Skripsi dan Bimbingan Skripsi																		■	■	■	■			
9	Sidang Meja Hijau																								■

### 3.4. Jenis dan Sumber Data

#### 3.4.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang bersifat kuantitatif. Dimana data kuantitatif adalah data yang dapat dinyatakan dengan angka-angka yang menunjukkan nilai terhadap besaran atas variabel yang diwakilinya.

Menurut Sugiyono(2012,Hal.13) Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka atau data kualitatif yang di angkakan.

### 3.4.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer adalah data yang didapat dari sumber pertama yang merupakan data mentah yang kelak akan diproses untuk tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan, misalnya dari individu atau perseorangan.
2. Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah diolah sehingga lebih komparatif jika digunakan oleh pihak yang berkepentingan. Data sekunder yang diperoleh antara lain berupa data laporan realisasi anggaran belanja daerah tahun 2013-2016.

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dan metode wawancara.

- 1) Metode Dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan suatu data yang diperoleh berupa dokumen-dokumen catatan perubahan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti mengenai cara penerapan fungsi anggaran belanja langsung maupun belanja tidak langsung pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 2) Metode Wawancara yaitu cara yang dilakukan oleh penulis yaitu meninjau secara langsung ke tempat lokasi penelitian dan melakukan tanya jawab seputar topik penelitian dengan peninjauan kepada pihak terkait bagian akuntansi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sebelum dibuatnya daftar pertanyaan wawancara, kisi-kisi wawancara yang dapat peneliti kemukakan adalah sebagai berikut :

**Tabel III.2**  
**Kisi-kisi Wawancara Realisasi Anggaran Belanja Daerah**

No	Komponen	Elemen	Nomor Butir	Total
1	Realisasi Anggaran Belanja Daerah	Anggaran	1,2,3,4,5	5
		Program/Kegiatan	6,7	2
		Laporan APBD	8	1
		Anggaran Belanja Daerah	9,10,11,12,13,14,15,16,	8
		Kinerja	17,18	2
			Total	18

### 3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknik deskriptif yaitu penulisan yang menggambarkan mengenai keadaan yang sebenarnya tentang objek yang akan diteliti, menurut keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian secara langsung. Menurut Sugiyono (2012, Hal.142) teknik deskriptif adalah menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dimana analisis yang digunakan oleh penulis untuk mengetahui realisasi anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan cara, yaitu

1. Mengumpulkan Data yaitu mengumpulkan data-data berupa laporan realisasi anggaran belanja daerah tahun 2013-2016. kemudian data tersebut diolah oleh peneliti untuk dianalisis.
2. Menganalisis Fungsi anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan menggunakan rasio efisiensi tahun 2013-2016.

3. Menganalisis tingkat efisiensi terhadap belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan membandingkan output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Dimana output adalah target realisasi belanja sedangkan input adalah seluruh jumlah belanja langsung dan belanja tidak langsung.
4. Menganalisis anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan menetapkan tujuan dan sasaran. kemudian membuat suatu rencana berupa kegiatan atau program untuk mencapai tujuan dan target yang diinginkan tersebut dapat berjalan dengan baik dan efisien.
5. Memberikan kesimpulan dan solusi terhadap analisis anggaran yang dilakukan baik pada anggaran belanja langsung maupun anggaran belanja tidak langsung pada tahun 2013-2016.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**

Pembentukan dinas pertambangan dan energi provinsi Sumatera Utara diawali dari terbentuknya kantor perwakilan departemen pertambangan Sumatera bagian utara Sumbagut di Medan pada tahun 1970, kemudian menjadi kantor wilayah pada tahun 1978. Kantor wilayah ini adalah instansi vertikal departemen pembentukan dinas pertambangan dan energi di daerah tingkat 1, dimana tanggung jawab dipegang oleh gubernur dengan tugas yang dibebankan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan tugas dan fungsi departemen pertambangan dan energi di wilayah yang bersangkutan.
2. Menyelenggarakan hubungan kerja sama dengan gubernur kepala daerah hukum tingkat 1 dan instansi lain yang terkait dalam rangka koordinasi pertimbangan petunjuk dan bantuan teknik serta memberikan laporan mengenai masalah utama pertambangan dan energi Sumatera Utara.
3. Menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing antar satuan organisasi baik dalam departemen serta dengan instansi vertikal lainnya dan pemerintah daerah dengan tugas pokoknya masing-masing.
4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan suksesnya program pertambangan dan energi provinsi Sumatera Utara.

#### 4.1.2 Analisis Anggaran Belanja Langsung Tahun 2013-2016

##### 1. Deskripsi Belanja Langsung

Belanja Langsung adalah merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dari suatu kegiatan terdiri dari dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Barang Modal.

##### A. Belanja Pegawai (Honorarium/Upah)

Belanja Pegawai merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orang atau personal yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau dengan kata lain merupakan biaya tetap pegawai.

Berikut ini adalah tabel uraian mengenai belanja pegawai pada tahun 2013 yaitu:

**Tabel IV.1**  
**Uraian Belanja Pegawai Tahun 2013**

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	2013	2013	
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>518.195.000</b>	<b>510.496.000</b>	<b>98,51</b>
Honorarium PNS	381.825.000	377.845.000	98,95
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	121.970.000	119.950.000	98,34
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	15.375.000	14.915.000	97,00
Honorarium Personil/Narasumber	129.000.000	127.500.000	98,83
Honorarium Pengelola Kegiatan	110.260.000	110.260.000	100
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.220.000	5.220.000	100
Honorarium Non PNS	88.260.000	85.100.000	96,41
Honorarium Tenaga ahli/instruktur/narasumber	78.150.000	78.150.000	100
Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak tetap	10.110.000	6.950.000	68,74
Uang Lembur	48.110.000	47.551.000	98,83
Uang Lembur PNS	48.110.000	47.551.000	98,83
<b>Total</b>	<b>1.554.585.000</b>	<b>1.531.488.000</b>	<b>98,51</b>

**Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2013 (Data Yang Diolah)**

Berdasarkan tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa belanja pegawai pada tahun 2013 sebesar Rp.510.496.000 dengan tingkat persentase sebesar 98,51%.Hal ini menunjukkan bahwa tingkat persentase pada belanja pegawai besar dikarenakan anggaran yang dikeluarkan lebih besar daripada realisasinya. Adapun belanja yang tidak melewati batas wajar pada belanja pegawai yaitu pada belanja honorarium pegawai/honorer/tidak tetap dengan kelebihan persentase sebesar 68,74%. Hal ini dapat dikatakan bahwa realisasi anggaran belanja langsung yaitu pada belanja pegawai pada tahun 2013 sebesar 98,51% melampaui batas anggaran yang telah ditetapkan sehingga anggaran pada belanja pegawai masih dikatakan tidak efisien dalam menyusun anggaran belanjanya. Kemudian untuk tabel uraian mengenai belanja pegawai pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

**Tabel IV.2**  
**Uraian Belanja Pegawai Tahun 2014**

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	2014	2014	
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>957.930.000</b>	<b>849.915.000</b>	<b>88,72</b>
Honorarium PNS	911.090.000	835.150.000	91,66
Honorarium Tim Pemeriksaan Barang	10.400.000	7.880.000	75,76
Honorarium Pengelolaan keuangan Daerah	126.210.000	126.210.000	100
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	6.120.000	6.120.000	100
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	21.140.000	21.140.000	100
Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	664.350.000	631.850.000	95,10
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	82.870.000	41.950.000	50,62
Honorarium Non PNS	30.500.000	-	-
Honorarium Pegawai Non PNS	28.000.000	-	-
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	2.500.000	-	-
Uang Lembur	16.340.000	14.765.000	90,36
Uang Lembur PNS	16.340.000	14.765.000	90,36
<b>Total</b>	<b>2.873.790.000</b>	<b>2.549.745.000</b>	<b>88,72</b>

**Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2014 (Data Yang Diolah)**

Berdasarkan tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa belanja pegawai pada tahun 2014 sebesar Rp.849.915.000. dengan tingkat persentase sebesar 88,72%.Hal ini menunjukkan bahwa tingkat persentase pada belanja pegawai besar dikarenakan anggaran yang dikeluarkan lebih besar daripada realisasinya. Adapun belanja yang tidak melewati batas wajar pada belanja pegawai yaitu pada belanja honorarium tim pemeriksaan barang dengan kelebihan persentasi sebesar 75,76%. Hal ini dapat dikatakan bahwa realisasi anggaran belanja langsung yaitu pada belanja pegawai pada tahun 2014 sebesar 88,72% melampaui batas anggaran yang telah ditetapkan sehingga anggaran pada belanja pegawai masih dikatakan cukup efisien dalam menyusun anggaran belanjanya.

Kemudian untuk tabel uraian mengenai belanja pegawai pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

**Tabel IV.3**  
**Uraian Belanja Pegawai Tahun 2015**

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	2015	2015	
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>9.372.860.000</b>	<b>8.721.807.933</b>	<b>93,05</b>
Honorarium PNS	-	-	-
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	597.850.000	435.660.000	72,87
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	59.170.000	50.120.000	84,70
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	22.980.000	19.860.000	86,42
Honorarium Pengelola Keuangan Daerah	209.000.000	209.000.000	100
<b>Total</b>	<b>10.261.860.000</b>	<b>9.436.447.933</b>	<b>91,95</b>

**Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 (Data Yang Diolah)**

Berdasarkan tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa belanja pegawai pada tahun 2015 sebesar Rp.8.721.807.933 dengan tingkat persentase sebesar 93,05%.Hal ini menunjukkan bahwa tingkat persentase pada belanja pegawai besar dikarenakan anggaran yang dikeluarkan lebih besar daripada realisasinya. Adapun belanja

yang tidak melewati batas wajar pada belanja pegawai yaitu pada belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan dengan kelebihan persentase sebesar 72,87%. Hal ini dapat dikatakan bahwa realisasi anggaran belanja langsung yaitu pada belanja pegawai pada tahun 2015 sebesar 93,05% melampaui batas anggaran yang telah ditetapkan sehingga anggaran pada belanja pegawai masih dikatakan tidak efisien dalam menyusun anggaran belanjanya.

Kemudian untuk tabel uraian mengenai belanja pegawai pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

**Tabel IV.4**  
**Uraian Belanja Pegawai Tahun 2016**

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	2016	2016	
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>11.018.437.000</b>	<b>9.715.506.138</b>	<b>88,17</b>
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	824.020.000	731.370.000	88,75
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	88.200.000	69.800.000	79,13
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.600.000	5.600.000	100
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	33.270.000	28.590.000	85,93
Honorarium Pengelola Keuangan Daerah	240.200.000	240.200.000	100
Uang Lembur PNS	16.340.000	14.410.000	88,18
Moderator	2.800.000	2.100.000	75
<b>Total</b>	<b>12.228.867.000</b>	<b>10.591.576.138</b>	<b>86,61</b>

**Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016 (Data Yang Diolah)**

Berdasarkan tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa belanja pegawai pada tahun 2016 sebesar Rp.9.715.506.138 dengan tingkat persentase sebesar 88,17%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat persentase pada belanja pegawai besar dikarenakan anggaran yang dikeluarkan lebih besar daripada realisasinya. Adapun belanja yang tidak melewati batas wajar pada belanja pegawai yaitu pada moderator dengan kelebihan persentase sebesar 75%. Hal ini dapat dikatakan bahwa realisasi

anggaran belanja langsung yaitu pada belanja pegawai pada tahun 2013 sebesar 88,17% melampaui batas anggaran yang telah ditetapkan sehingga anggaran pada belanja pegawai masih dikatakan cukup efisien dalam menyusun anggaran belanjanya.

#### B. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak berhubungan dengan pelayanan publik.

Berikut ini adalah tabel uraian mengenai belanja barang dan jasa pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

**Tabel IV.5**  
**Uraian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2013**

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	2013	2013	
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.734.190.650</b>	<b>3.683.897.150</b>	<b>98,65</b>
Belanja Bahan Pakai Habis	148.069.400	147.148.800	99,37
Belanja Alat Tulis Kantor	82.371.900	81.738.400	99,23
Belanja Dokumen/Administrasi tender	1.400.000	1.395.400	99,67
Belanja Alat Listrik dan Elektronik	12.000.000	11.991.500	99,92
Belanja perangko,materai,dan benda pos lainnya	7.714.500	7.710.000	99,94
Belanja Bahan Bakar Minyak	44.583.000	44.313.500	99,39
Belanja Bahan Material	28.000.000	27.972.500	99,90
Belanja Dekorasi	22.000.000	21.997.500	99,98
Belanja Dokumentasi	1.000.000	975.000	97,5
Belanja Bahan Publikasi	2.500.000	2.500.000	100
Belanja Bahan Percontohan	2.500.000	2.500.000	100
Belanja Jasa Kantor	550.248.000	539.218.000	97,99
Pembayaran Pajak	10.548.000	5.717.800	54,20
Belanja telepon	10.400.000	8.616.050	82,84
Belanja Air	15.600.000	12.407.400	79,53
Belanja Listrik	74.400.000	74.400.000	100
Belanja Surat Kabar/Majalah	10.000.000	9.686.000	96,86
Belanja kawat/faximili/internet	20.800.000	20.797.750	99,98
Belanja Sertifikasi	5.000.000	5.000.000	100
Belanja Jasa Transaksi Keuangan	12.000.000	12.000.000	100
Belanja Jasa Pihak Ketiga	354.500.000	353.620.000	99,75
Belanja transportasi dan akomodasi	37.000.000	36.971.000	99,92
Belanja perawatan kendaraan bermotor	42.000.000	32.209.850	76,69
Belanja jasa service	8.500.000	8.499.500	99,99
Belanja penggantian suku cadang	14.000.000	13.999.500	99,99

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	19.500.000	9.710.850	49,79
Belanja Cetak dan Penggandaan	47.714.050	46.316.350	97,07
Belanja Cetak	36.646.000	35.967.500	98,14
Belanja Penggandaan	11.068.050	10.348.850	93,50
Belanja sewa rumah /gedung/gudang/parkir	99.500.000	99.500.000	100
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	99.500.000	99.500.000	100
Belanja sewa sarana mobilitas	26.600.000	26.600.000	100
Belanja sewa sarana mobilitas darat	26.600.000	26.600.000	100
Belanja makanan dan minuman	71.290.000	71.135.000	99,78
Belanja makanan dan minuman harian pegawai	13.320.000	13.307.500	99,90
Belanja makanan dan minuman rapat	14.210.000	14.085.000	99,12
Belanja makanan dan minuman tamu	43.760.000	43.742.500	99,96
Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	35.223.000	35.223.000	100
Belanja pakaian KORPRI	35.223.000	35.223.000	100
Belanja perjalanan dinas	2.680.086.200	2.653.123.650	98,99
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.030.931.000	2.015.335.000	99,23
Belanja perjalanan dinas luar daerah	649.155.200	637.788.650	98,24
Belanja Khursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.460.000	5.450.000	99,81
Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	5.460.000	5.450.000	99,81
<b>Total</b>	<b>11.202.571.950</b>	<b>11.051.689.450</b>	<b>98,65</b>

**Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2013 (Data Yang Diolah)**

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa belanja barang dan jasa pada tahun 2013 sebesar Rp.3.683.897.150 dengan kelebihan persentase sebesar 98,65%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat persentase pada belanja barang dan jasa pada tahun 2013 lebih besar anggaran yang dikeluarkan daripada realisasi belanjanya sehingga tingkat persentase besar. Adapun belanja yang tidak melewati batas wajar pada belanja barang dan jasa yaitu pada pembayaran pajak sebesar 54,20% dan belanja surat tanda nomor kendaraan sebesar 49,79% artinya pada pembayaran pajak dan belanja surat tanda nomor kendaraan masih dikatakan efisien dalam menggunakan dana belanjanya. Akan tetapi dari secara keseluruhan jumlah persentase pada belanja barang dan jasa tahun 2013 masih belum

dikatakan efisien dikarenakan tingkat efisien melewati batas wajar sebesar 98,65%.

Kemudian untuk tabel uraian mengenai belanja barang dan jasa pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

**Tabel IV.6**  
**Uraian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2014**

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	2014	2014	
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>11.306.518.400</b>	<b>10.701.858.850</b>	<b>94,65</b>
Belanja Bahan Pakai Habis	248.554.800	230.688.950	92,81
Belanja Alat Tulis Kantor	77.714.800	76.838.450	98,87
Belanja Dokumen/Administrasi tender	930.000	-	
Belanja Alat Listrik dan Elektronik	30.000.000	29.955.400	99,85
Belanja peranko,materai,dan benda pos lainnya	14.400.000	14.400.000	100
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	125.510.000	109.495.100	87,24
Belanja Bahan Material	356.870.000	342.996.000	96,11
Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	7.250.000	7.240.000	99,86
Belanja Bahan Dekorasi	79.620.000	66.656.000	83,71
Belanja Bahan Bahan Baku Bangunan	255.000.000	254.100.000	99,64
Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	15.000.000	15.000.000	100
Belanja Jasa Kantor	698.925.000	655.394.800	93,77
Belanja Jasa Kegiatan Tertentu	85.300.000	84.748.000	99,35
Belanja Jasa Kebersihan	190.000.000	189.600.000	99,78
Belanja Jasa Keamanan Kantor	180.000.000	179.820.000	99,9
Belanja Telepon	13.200.000	9.514.900	72,08
Belanja Air	22.800.000	9.847.300	43,18
Belanja Listrik	114.000.000	112.161.400	98,38
Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	9.250.000	-	
Belanja Surat Kabar/Majalah	20.000.000	17.644.500	88,22
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Satelit	23.400.000	22.005.550	94,04
Belanja Sertifikasi	8.500.000	-	
Belanja Jasa Transaksi Keuangan	32.475.000	30.053.150	92,54
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	34.490.000	21.238.150	61,57
Belanja Jasa Service	8.820.000	2.602.000	29,50
Belanja Penggantian Suku Cadang	14.420.000	14.416.350	99,97
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	11.250.000	4.219.800	37,50
Belanja Cetak dan Penggandaan	137.379.600	120.931.900	88,03
Belanja Cetak	98.222.400	86.571.000	88,13
Belanja Penggandaan	39.157.200	34.360.900	87,75
Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	8.100.000	8.030.000	99,13



Belanja Sewa/Gedung/Tempat	8.100.000	8.030.00	99,13
Belanja sewa sarana mobilitas	5.500.000	4.785.000	87
Belanja sewa sarana mobilitas darat	5.500.000	4.785.000	87
Belanja makanan dan minuman	116.352.000	109.243.000	93,89
Belanja makanan dan minuman harian pegawai	22.632.000	22.594.000	99,83
Belanja makanan dan minuman rapat	79.220.000	72.187.000	91,12
Belanja makanan dan minuman tamu	14.500.000	14.462.000	99,73
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	56.250.000	55.875.000	99,33
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	56.250.000	55.875.000	99,33
Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	81.250.000	80.850.000	99,50
Belanja pakaian Batik Tradisional	81.250.000	80.850.000	99,50
Belanja perjalanan dinas	3.859.693.000	3.474.290.550	90,01
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.603.665.000	2.525.060.000	96,98
Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.116.200.000	949.230.550	85,04
Belanja perjalanan dinas uar Negeri	139.828.000	-	
Belanja Khursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	42.554.000	35.354.000	83,08
Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	42.554.000	35.354.000	83,08
Belanja Pemeliharaan	76.000.000	75.713.500	99,63
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Non Kapitalisasi)	76.000.000	75.713.500	99,63
Belanja Jasa Konsultasi	507.600.000	507.371.000	98,77
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.600.000	14.000.000	79,54
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	490.000.000	487.371.000	99,46
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Pihak Ketiga	5.077.000.000	4.985.097.000	98,18
Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.800.000.000	2.723.102.000	97,25
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Pada SKPD	2.277.000.000	2.261.995.000	99,34
<b>Total</b>	<b>33.915.555.200</b>	<b>32.002.333.550</b>	<b>94,35</b>

**Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2014 (Data Yang Diolah)**

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa belanja barang dan jasa pada tahun 2014 sebesar Rp.10.701.858.850 dengan kelebihan persentase sebesar 94,65%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat persentase pada belanja barang dan jasa pada tahun 2014 lebih besar anggaran yang dikeluarkan daripada realisasi belanjanya sehingga tingkat persentase besar. Adapun belanja yang tidak melewati batas wajar pada belanja barang dan jasa yaitu pada belanja air sebesar 43,18% ;

belanja jasa service sebesar 29,50% ; dan belanja surat tanda nomor kendaraan sebesar 37,50% artinya pada belanja air, belanja jasa service dan belanja surat tanda nomor kendaraan masih dikatakan efisien dalam menggunakan dana belanjanya. Akan tetapi dari secara keseluruhan jumlah persentase pada belanja barang dan jasa tahun 2014 masih belum dikatakan efisien dikarenakan tingkat efisien melewati batas wajar sebesar 94,65%.

Kemudian untuk tabel uraian mengenai belanja barang dan jasa pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

**Tabel IV 7**  
**Uraian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2015**

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	2015	2015	
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>16.956.915.000</b>	<b>15.889.741.470</b>	<b>93,71</b>
Belanja Alat Tulis Kantor	75.580.000	75.433.200	99,80
Belanja Alat Listrik dan Elektronik	40.000.000	39.550.400	98,87
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya	15.000.000	15.000.000	100
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	81.421.200	79.304.400	97,40
Belanja Dekorasi	87.000.000	81.242.600	93,38
Belanja Publikasi dan Dokumentasi	1.800.000	-	-
Belanja telepon	5.199.996	3.391.400	65,21
Belanja Air	12.072.648	9.870.950	81,76
Belanja Listrik	120.875.256	111.474.100	92,22
Belanja Surat Kabar/Majalah	25.000.000	23.464.500	93,85
Belanjakawat/faximili/internet/intranet/TV kabel/TV satelit	78.000.000	62.618.500	80,28
Belanja Sertifikasi	13.000.000	13.000.000	100
Belanja Jasa Transaksi Keuangan	42.053.100	41.053.100	97,62
Belanja transportasi dan akomodasi	7.500.000	7.500.000	100
Belanja jasa service	25.000.000	5.268.300	21,07
Belanja penggantian suku cadang	33.000.000	29.376.300	89,01
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	12.000.000	8.251.800	68,76
Belanja Cetak	81.144.000	80.921.600	99,72
Belanja Penggandaan	23.479.000	22.622.900	96,35
Belanja sewa gedung/kantor/tempat	19.500.000	19.500.000	100
Belanja sewa sarana mobilitas darat	4.500.000	4.500.000	100
Belanja makanan dan minuman harian pegawai	24.000.000	23.522.000	98,00
Belanja makanan dan minuman rapat	19.000.000	18.949.000	99,73

Belanja makanan dan minuman tamu	22.000.000	21.932.000	99,69
Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	74.750.000	72.715.000	97,27
Belanja pakaian dinas harian (PDH)	63.250.000	62.617.000	98,99
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.487.462.000	2.446.925.100	98,37
Belanja perjalanan dinas luar daerah	752.347.950	723.305.950	96,13
Belanja Kursus-kursus singkat/pelatihan	7.500.000	7.500.000	100
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	400.000.000	398.770.000	99,69
Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor ( Non Kapitalisasi)	122.470.000	118.969.500	97,14
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	120.000.000	119.240.000	99,36
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	198.516.000	193.785.000	97,61
Belanja Jasa Tenaga Ahli/instruktur/narasumber	5.600.000	5.600.000	100
Belanja Jasa Konsultasi Kajian/Survey	198.341.000	198.341.000	100
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	7.195.102.000	7.195.102.000	100
<b>Total</b>	<b>29.450.379.150</b>	<b>28.230.359.070</b>	<b>95,85</b>

**Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 (Data Yang Diolah)**

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa belanja barang dan jasa pada tahun 2015 sebesar Rp.15.889.741.470 dengan kelebihan persentase sebesar 93,71%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat persentase pada belanja barang dan jasa pada tahun 2015 lebih besar anggaran yang dikeluarkan daripada realisasi belanjanya sehingga tingkat persentase besar. Adapun belanja yang tidak melewati batas wajar pada belanja barang dan jasa yaitu pada belanja telepon sebesar 65,21% dan belanja surat tanda nomor kendaraan sebesar 68,76% artinya pada belanja telepon dan belanja surat tanda nomor kendaraan masih dikatakan efisien dalam menggunakan dana belanjanya. Akan tetapi dari secara keseluruhan jumlah persentase pada belanja barang dan jasa tahun 2015 masih belum dikatakan efisien dikarenakan tingkat efisien melewati batas wajar sebesar 93,71%.

Untuk tabel uraian belanja barang dan jasa pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

**Tabel IV 8**  
**Uraian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2016**

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	2016	2016	
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>13.013.764.150</b>	<b>12.855.455.600</b>	<b>98,78</b>
Belanja Alat Tulis Kantor	75.000.000	74.955.700	99,94
Belanja Alat Listrik dan Elektronik	40.000.000	39.911.800	99,77
Belanja perangko,materai,dan benda pos lainnya	15.000.000	14.400.000	96
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	142.060.000	94.935.700	66,82
Belanja Dekorasi	87.000.000	75.026.000	86,23
Belanja Publikasi dan Dokumentasi	1.800.000	-	
Belanja telepon	13.200.000	3.862.440	29,26
Belanja Air	22.800.000	12.086.990	53,01
Belanja Listrik	144.000.000	96.672.070	67,13
Belanja Surat Kabar/Majalah	23.000.000	17.731.000	77,09
Belanjakawat/faximili/internet/intranet/TV kabel/TV satelit	82.200.000	79.081.955	96,20
Belanja Sertifikasi	9.000.000	6.000.000	66,66
Belanja Jasa Transaksi Keuangan	40.900.000	36.053.100	88,14
Belanja Jasa Kebersihan	235.000.000	234.696.000	99,87
Belanja Jasa Keamanan Kantor	200.000.000	199.584.000	99,79
Belanja Jasa Kegiatan Tertentu	85.300.000	65.862.500	77,21
Belanja jasa service	20.020.000	9.291.900	46,41
Belanja penggantian suku cadang	33.030.000	8.295.550	25,11
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	11.250.000	9.261.000	82,32
Belanja Cetak	143.918.000	140.300.650	97,48
Belanja Penggandaan	50.310.000	43.459.800	86,38
Belanja sewa gedung/kantor/tempat	65.600.000	30.885.000	47,08
Belanja sewa sarana mobilitas darat	6.000.000	5.990.000	99,83
Belanja makanan dan minuman harian pegawai	28.632.000	28.491.000	99,50
Belanja makanan dan minuman rapat	54.000.000	52.821.500	97,81
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.503.700.000	1.496.212.000	99,50
Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor ( Non Kapitalisasi)	129.000.000	125.008.500	96,90
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	240.000.000	238.805.000	99,50
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	139.000.000	138.400.000	99,56
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	50.000.000	49.800.000	99,6
Belanja Jasa Konsultasi Kajian/Survey	400.000.000	383.559.000	95,88
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	7.587.500.000	7.084.413.200	93,36
<b>Total</b>	<b>24.691.984.150</b>	<b>23.751.308.955</b>	<b>96,19</b>

**Sumber:Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016 (Data Yang Diolah)**

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa belanja barang dan jasa pada tahun 2016 sebesar Rp.12.855.455.600 dengan kelebihan persentase sebesar

98,78%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat persentase pada belanja barang dan jasa pada tahun 2016 lebih besar anggaran yang dikeluarkan daripada realisasi belanjanya sehingga tingkat persentase besar. Adapun belanja yang tidak melewati batas wajar pada belanja barang dan jasa yaitu pada belanja bahan bakar minyak/gas sebesar 66,82% ; belanja telepon sebesar 29,26% ; belanja air sebesar 53,01% ; belanja penggantian suku cadang sebesar 25,11% ; dan belanja sewa gedung/kantor/tempat sebesar 47,08%. artinya pada belanja bahan bakar minyak/gas, belanja telepon, belanja air, belanja penggantian suku cadang dan belanja sewa gedung/kantor/tempat masih dikatakan efisien dalam menggunakan dana belanjanya. Akan tetapi dari secara keseluruhan jumlah persentase pada belanja barang dan jasa tahun 2016 masih belum dikatakan efisien dikarenakan tingkat efisien melewati batas wajar sebesar 98,65%

### C. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan dapat menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan.

Dibawah ini adalah tabel mengenai uraian belanja modal pada tahun 2013 yaitu sebagai berikut:

**Tabel IV 9**  
**Uraian Belanja Modal Tahun 2013**

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	2013	2013	
<b>Belanja Modal</b>	<b>1.248.740.000</b>	<b>1.247.710.000</b>	<b>99,91</b>
Belanja modal pengadaan komputer	51.250.000	50.550.000	98,63
Belanja modal pengadaan komputer note book	46.550.000	46.050.000	100
Belanja modal Pengadaan printer	4.700.000	4.500.000	95,74

Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air	591.951.000	591.951.000	100
Belanja modal pengadaan konstruksi sumur bor	591.951.000	591.951.000	100
Belanja modal pengadaan instalasi listrik dan telepon	539.539.000	539.539.000	100
Belanja modal pengadaan instalasi listrik	539.539.000	539.539.000	100
Belanja modal pengadaan sarana dan prasarana	66.000.000	65.670.000	99,5
Belanja modal pengadaan sarana dan prasarana	66.000.000	65.670.000	99,5
<b>Total</b>	<b>3.746.220.000</b>	<b>3.743.130.000</b>	<b>99,91</b>

**Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2013 (Data Yang Diolah)**

Berdasarkan tabel 4.9 menyatakan bahwa belanja modal pada tahun 2013 sebesar Rp.1.247.710.000 dengan kelebihan persentase sebesar 99,91%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat persentase pada belanja modal pada tahun 2013 lebih besar anggaran yang dikeluarkan daripada realisasi belanjanya sehingga tingkat persentasinya besar. Dan dapat dilihat bahwa bagian belanja modal lainnya juga memiliki tingkat persentase yang besar sehingga melewati batas wajar. Dengan demikian realisasi belanja modal pada tahun 2013 sebesar 99,91% melampaui anggaran yang telah ditetapkan. Sehingga belanja modal pada tahun 2013 masih dikatakan tidak efisien dalam menyusun anggaran belanjanya.

Kemudian Untuk tabel mengenai uraian belanja modal pada tahun 2014 yaitu sebagai berikut:

**Tabel IV.10**  
**Uraian Belanja Modal Tahun 2014**

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	2014	2014	
<b>Belanja Modal</b>	<b>2.146.379.820</b>	<b>1.940.505.000</b>	<b>90,40</b>
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	130.000.000	128.500.000	98,84
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemboran Air Tanah	130.000.000	128.500.000	98,84
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	1.450.000.000	1.251.000.000	86,27

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	1.450.000.000	1.251.000.000	86,27
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	103.000.000	102.498.000	99,51
Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	32.500.000	32.340.000	99,50
Belanja Modal Pengadaan Mesin Fotocopy	24.000.000	23.958.000	99,83
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Lainnya	46.500.000	46.200.000	99,35
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	35.100.000	34.903.000	99,43
Belanja Modal Pengadaan almari	30.600.000	30.448.000	99,50
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	4.500.000	4.455.000	99
Belanja Modal Pengadaan Komputer	92.079.820.	89.738.000	97,45
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	40.500.000	40.392.000	99,73
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	19.000.000	18.898.000	99,46
Belanja Modal Pengadaan Printer	21.579.820	20.658.000	95,73
Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	11.000.000	9.790.000	89
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	14.500.000	14.377.000	99,15
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	14.500.000	14.377.000	99,15
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	5.000.000	4.950.000	99
Belanja Modal Pengadaan Dispenser	5.000.000	4.950.000	99
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	73.500.000	73.000.000	99,32
Belanja Modal Pengadaan Karpets	73.500.000	73.000.000	99,32
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	2.100.000	2.090.000	99,53
Belanja Modal Pengadaan Kamera	2.100.000	2.090.000	99,53
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	185.000.000	184.552.000	99,75
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	185.000.000	184.552.000	99,75
Belanja Modal Pengadaan Buku /Kepustakaan	56.100.000	54.897.000	97,85
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	15.000.000	15.000.000	100
Belanja Modal Pengadaan Peta/Atlas/Globe	41.100.000	39.897.000	97,07
<b>Total</b>	<b>6.439.139.460</b>	<b>5.821.515.000</b>	<b>90,40</b>

Sumber:Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2014 (Data Yang Diolah)

Berdasarkan tabel 4.10 menyatakan bahwa belanja modal pada tahun 2014 sebesar Rp.1.940.505.000 dengan kelebihan persentase sebesar 90,40 %. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat persentase pada belanja modal pada tahun 2014 lebih besar anggaran yang dikeluarkan daripada realisasi belanjanya sehingga tingkat persentasinya besar. Dan dapat dilihat bahwa bagian belanja modal lainnya juga memiliki tingkat persentase yang besar sehingga melewati batas wajar. Tetapi ada bagian belanja modal yang memiliki tingkat persentase yang tidak melewati batas wajar yaitu belanja modal pengadaan alat-alat angkutan sebesar 86,27%. Dengan demikian realisasi belanja modal pada tahun 2014 sebesar 99,91% melampaui anggaran yang telah ditetapkan. Sehingga belanja modal pada tahun 2014 masih dikatakan tidak efisien dalam menyusun anggaran belanjanya.

Kemudian Untuk tabel mengenai uraian belanja modal pada tahun 2015 yaitu sebagai berikut:

**Tabel IV.11**  
**Uraian Belanja Modal Tahun 2015**

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	2015	2015	
<b>Belanja Modal</b>	<b>718.400.000</b>	<b>710.327.000</b>	<b>98,88</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan meubelair	150.000.000	146.460.000	97,64
Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Pendingin	80.000.000	79.750.000	99,68
Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Dapur	10.000.000	9.988.000	99,88
Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya	40.000.000	39.897.000	99,74
Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Personal Komputer	152.800.000	152.405.000	99,74
Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Peralatan Personal Komputer	12.000.000	11.990.000	99,91
Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan peralatan Jaringan	6.015.000	-	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya- Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	25.000.000	24.553.000	98,21
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-	5.000.000	5.000.000	100



Pengadaan Peralatan Jaringan			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	12.000.000	11.940.000	99,5
Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Bantu Keamanan	20.000.000	19.833.000	99,16
Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	15.000.000	14.940.000	99,6
<b>Total</b>	<b>1.246.215.000</b>	<b>1.227.083.000</b>	<b>98,46</b>

**Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 (Data Yang Diolah)**

Berdasarkan tabel 4.11 menyatakan bahwa belanja modal pada tahun 2015 sebesar Rp.710.327.000. dengan kelebihan persentase sebesar 98,88%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat persentase pada belanja modal pada tahun 2015 lebih besar anggaran yang dikeluarkan daripada realisasi belanjanya sehingga tingkat persentasinya besar. Dan dapat dilihat bahwa bagian belanja modal lainnya juga memiliki tingkat persentase yang besar sehingga melewati batas wajar. Dengan demikian realisasi belanja modal pada tahun 2015 sebesar 98,88% melampaui anggaran yang telah ditetapkan. Sehingga belanja modal pada tahun 2015 masih dikatakan tidak efisien dalam menyusun anggaran belanjanya.

Kemudian Untuk tabel mengenai uraian belanja modal pada tahun 2016 yaitu sebagai berikut:

**Tabel IV.12**  
**Uraian Belanja Modal Tahun 2016**

Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%
<b>Belanja Modal</b>	<b>475.815.000</b>	<b>465.043.000</b>	<b>97,74</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan meubelair	140.000.000	138.630.000	99,02
Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Pendingin	81.000.000	80.650.000	99,56
Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Dapur	12.000.000	11.904.000	99,2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Peralatan Mini Komputer	14.000.000	13.970.000	99,78
Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Personal Komputer	239.000.000	238.190.000	99,66

Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Peralatan Personal Komputer	44.000.000	41.600.000	94,54
Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	60.000.000	57.720.000	96,2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Ukur Universal	29.500.000	29.150.000	98,81
Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Ukur lainnya	14.000.000	13.970.000	99,78
Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	25.400.000	25.350.000	99,80
Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Kantor Lainnya	7.500.000	7.480.000	99,73
<b>Total</b>	<b>1.142.215.000</b>	<b>1.123.657.000</b>	<b>98,37</b>

**Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016 (Data Yang Diolah)**

Berdasarkan tabel 4.12 menyatakan bahwa belanja modal pada tahun 2016 sebesar Rp.465.043.000 dengan kelebihan persentase sebesar 97,74%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat persentase pada belanja modal pada tahun 2016 lebih besar anggaran yang dikeluarkan daripada realisasi belanjanya sehingga tingkat persentasinya besar. Dan dapat dilihat bahwa bagian belanja modal lainnya juga memiliki tingkat persentase yang besar sehingga melewati batas wajar. Dengan demikian realisasi belanja modal pada tahun 2016 sebesar 97,74% melampaui anggaran yang telah ditetapkan. Sehingga belanja modal pada tahun 2016 masih dikatakan tidak efisien dalam menyusun anggaran belanjanya.

### 4.1.3 Analisis Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2013-2016

#### 1. Deskripsi Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung adalah merupakan belanja yang dianggarkan oleh pemerintah daerah yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Dibawah ini merupakan tabel mengenai uraian realisasi anggaran belanja tidak langsung tahun 2013 yaitu :

**Tabel IV.13**  
**Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2013**

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>11.151.503.254</b>	<b>8.285.543.930</b>	<b>74,59</b>
Belanja Pegawai	11.151.503.254	8.285.543.930	74,59
Gaji dan Tunjangan	6.551.503.254	5.766.543.930	88,01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.916.347.483	4.368.277.780	88,85
Tunjangan Keluarga	514.459.855	456.622.853	88,75
Tunjangan Jabatan	174.180.000	167.830.000	96,35
Tunjangan Fungsional	87.957.663	62.725.000	71,31
Tunjangan Fungsional Umum	264.252,631	224.140.000	84,82
Tunjangan Beras	397.186.977	324.607.290	81,72
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	88.399.455	75.997.706	85,97
Pembulatan Gaji	103.695	103.313	99,63
Iuran Asuransi Kesehatan	108.615.495	86.239.988	79,39
Tambahan Penghasilan PNS	4.600.000.000	2.519.000.000	54,79
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	4.600.000.000	2.519.000.000	54,79
<b>Total</b>	<b>44.606.013.016</b>	<b>33.142.175.720</b>	<b>74,29</b>

**Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun (Data yang diolah peneliti)**

Pada tabel 4.13 dapat dilihat bahwa jumlah realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp.8.285.543.930 dengan tingkat persentase 74,59%. Adapun jumlah realisasi yang kecil akan tetapi tingkat kelebihan persentase nya besar yaitu pada pembulatan gaji sebesar 99,63% dengan jumlah realisasi Rp.103.313. Berikutnya pada tunjangan fungsional sebesar Rp.62.725.000 dengan kelebihan persentase 71,31% ,kemudian pada iuran asuransi kesehatan sebesar Rp.86.239.988 dengan kelebihan persentase sebesar 79,39% dan pada tambahan penghasilan PNS dan

penghasilan berdasarkan beban kerja sebesar Rp.2.519.000.000 dengan kelebihan persentase sebesar 54,79%. Dengan hal ini realisasi pembulatan gaji,tunjangan fungsional,iuran asuransi kesehatan,dan tambahan penghasilan PNS serta penghasilan berdasarkan beban kerja tersebut masih dikatakan batas wajar dalam penggunaan anggaran nya dengan belanja tidak langsung tidak melampaui anggaran yang telah ditetapkan dengan kelebihan persentase sebesar 74,59% diatas anggaran masih dikatakan normal dan penyimpangan masih dikatakan normal. Dengan demikian untuk tahun 2013 pada anggaran belanja tidak langsung dapat dikatakan efisien dalam menyusun anggaran.

Dibawah ini merupakan untuk tabel mengenai uraian realisasi anggaran belanja tidak langsung tahun 2014 yaitu :

**Tabel IV.14**  
**Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2014**

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>9.538.327.000</b>	<b>8.384.762.444</b>	<b>87,90</b>
Belanja Pegawai	9.538.327.000	8.384.762.444	87,90
Gaji dan Tunjangan	7.006.327.000	5.889.824.944	84,06
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.210.233.200	4.467.032.140	85,73
Tunjangan Keluarga	544.369.800	454.249.318	83,44
Tunjangan Jabatan	250.083.000	231.610.000	92,61
Tunjangan Fungsional	100.147.700	64.350.000	64,25
Tunjangan Fungsional Umum	267.088.900	194.140.000	72,68
Tunjangan Beras	386.875.800	259.200.000	66,99
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	95.706.700	87.004.066	90,90
Pembulatan Gaji	122.900	81.382	66,21
Iuran Asuransi Kesehatan	151.699.000	132.158.038	87,11
Tambahan Penghasilan PNS	2.532.000.000	2.494.937.500	98,53
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.532.000.000	2.494.937.500	98,53
<b>Total</b>	<b>38.153.308.000</b>	<b>33.539.049.776</b>	<b>87,90</b>

**Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (Data Yang Diolah Peneliti)**

Pada tabel 4.14 dapat dilihat bahwa jumlah realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp.8.384.762.444 dengan tingkat persentase 87,90%. Adapun jumlah realisasi yang kecil akan tetapi tingkat kelebihan persentasenya besar yaitu pada pembulatan gaji sebesar 66,21% dengan jumlah realisasi Rp.81.382. Berikutnya pada tunjangan fungsional sebesar Rp.64.350.000 dengan kelebihan persentase 64,25% ,kemudian pada tunjangan beras sebesar Rp.259.200.000 dengan kelebihan persentase sebesar 66,99% dan pada tunjangan fungsional umum sebesar Rp.194.140.000 dengan kelebihan persentase sebesar 72,68%. Dengan hal ini realisasi pembulatan gaji,tunjangan fungsional,tunjangan beras,dan tunjangan fungsional umum tersebut masih dikatakan batas wajar dalam penggunaan anggarannya dengan belanja tidak langsung tidak melampaui anggaran yang telah ditetapkan dengan kelebihan persentase sebesar 87,90% diatas anggaran masih dikatakan normal dan penyimpangan masih dikatakan normal. Dengan demikian untuk tahun 2014 pada anggaran belanja tidak langsung dapat dikatakan efisien dalam menyusun anggaran.

Dibawah ini merupakan untuk tabel mengenai uraian realisasi anggaran belanja tidak langsung tahun 2015 yaitu :

**Tabel IV.15**  
**Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2015**

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>9.356.520.000</b>	<b>8.707.397.933</b>	<b>93,06</b>
Belanja Pegawai	<b>9.356.520.000</b>	<b>8.707.397.933</b>	<b>93,06</b>
Gaji dan Tunjangan	-	-	-
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.418.511.000	5.048.502.000	93,17
Tunjangan Keluarga	542.480.000	450.905.342	83,11
Tunjangan Jabatan	264.174.000	223.510.000	84,60
Tunjangan Fungsional	79.182.000	68.650.000	86,69
Tunjangan Fungsional Umum	209.674.000	171.720.000	81,89
Tunjangan Beras	328.309.000	248.473.020	75,68

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	148.634.000	32.954.281	22,17
Pembulatan Gaji	150.000	61.473	40,98
Iuran Asuransi Kesehatan	178.830.000	136.093.887	76,10
Iuran Jaminan Kematian	16.121.000	12.233.965	75,88
Tambahan Penghasilan PNS	2.930.475.000	2.597.975.000	88,65
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.930.475.000	2.597.975.000	88,65
<b>Total</b>	<b>31.760.055.000</b>	<b>28.970.895.553</b>	<b>91,22</b>

**Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (Data Yang Diolah Peneliti)**

Pada tabel 4.15 dapat dilihat bahwa jumlah realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp.8.707.397.933 dengan tingkat persentase 93,06%. Adapun jumlah realisasi yang kecil akan tetapi tingkat kelebihan persentasenya kecil juga yaitu pada pembulatan gaji sebesar 40,98% dengan jumlah realisasi Rp.61.473. Berikutnya pada tunjangan beras sebesar Rp.248.473.020 dengan kelebihan persentase sebesar 75,68% dan pada tunjangan PPh/Tunjangan Khusus sebesar Rp.32.954.281 dengan kelebihan persentase sebesar 22,17%. Dengan hal ini realisasi pembulatan gaji, tunjangan beras, dan tunjangan PPh/tunjangan khusus tersebut masih dikatakan batas wajar dalam penggunaan anggarannya dengan belanja tidak langsung tidak melampaui anggaran yang telah ditetapkan dengan kelebihan persentase sebesar 93,06% di atas anggaran masih dikatakan normal dan penyimpangan masih dikatakan normal. Dengan demikian untuk tahun 2015 pada anggaran belanja tidak langsung dapat dikatakan efisien dalam menyusun anggaran.

Dibawah ini merupakan tabel mengenai uraian realisasi anggaran belanja tidak langsung tahun 2016 yaitu :

**Tabel IV.16**  
**Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2016**

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>10.129.437.000</b>	<b>9.000.866.138</b>	<b>88,86</b>
Belanja Pegawai	10.129.437.000	9.000.866.138	88,86
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.026.438.000	4.735.628.300	94,21
Tunjangan Keluarga	502.000.000	474.424.276	94,50
Tunjangan Jabatan	256.984.000	229.805.000	89,42
Tunjangan Fungsional	74.984.000	67.090.000	89,47
Tunjangan Fungsional Umum	214.250.000	187.325.000	87,43
Tunjangan Beras	338.400.000	294.624.600	87,06
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	133.963.000	130.340.705	97,29
Pembulatan Gaji	135.000	83.893	62,14
Iuran Asuransi Kesehatan	169.666.000	147.101.159	86,70
Tambahan Penghasilan PNS	2.639.700.000	2.440.975.000	92,47
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.639.700.000	2.440.975.000	92,47
<b>Total</b>	<b>32.255.094.000</b>	<b>29.150.105.209</b>	<b>90,37</b>

**Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (Data Yang Diolah Peneliti)**

Pada tabel 4.16 dapat dilihat bahwa jumlah realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp.9.000.866.138 dengan tingkat persentase 88,86%. Adapun jumlah realisasi yang kecil akan tetapi tingkat kelebihan persentasenya kecil juga yaitu pada pembulatan gaji sebesar 62,14% dengan jumlah realisasi Rp.83.893. Berikutnya pada tunjangan beras sebesar Rp.294.624.600 dengan kelebihan persentase sebesar 87,06% dan pada iuran asuransi kesehatan sebesar Rp.147.101.159 dengan kelebihan persentase sebesar 86,70%. Dengan hal ini realisasi pembulatan gaji, tunjangan beras, dan iuran asuransi kesehatan tersebut masih dikatakan batas wajar dalam penggunaannya dengan belanja tidak langsung tidak melampaui anggaran yang telah ditetapkan dengan kelebihan persentase sebesar 88,86% di atas anggaran masih dikatakan normal dan penyimpangan masih dikatakan normal. Dengan demikian untuk tahun 2016 pada

anggaran belanja tidak langsung dapat dikatakan efisien dalam menyusun anggaran.

#### **4.1.4 Fungsi Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Sebagai Alat Penilaian Kinerja.**

Dari hasil analisis penelitian diatas menunjukkan bahwa fungsi anggaran pada belanja langsung masih belum baik dan efisien dikarenakan lebih besar dalam jumlah anggaran yang dikeluarkan daripada jumlah yang terealisasi. Hanya terlihat beberapa yang efisien dalam pengelolaan dana belanjanya tetapi secara keseluruhan fungsi anggaran belanja langsung masih terlihat belum baik sehingga sangat berpengaruh dalam penilaian kinerjanya. Jika fungsi anggaran yang digunakan baik pada anggaran belanja langsung akan menghasilkan tingkat kinerja yang baik pula. Artinya dalam fungsi anggaran belanja langsung sebagai alat penilaian kinerja masih belum baik karena terlihat lebih kecilnya jumlah terealisasi dengan yang telah dianggarkan.

Sedangkan pada anggaran belanja tidak langsung menunjukkan bahwa dalam fungsi anggaran yang digunakan sudah dikatakan baik dan efisien terlihat dari kecilnya jumlah anggaran belanja yang terealisasi dari yang telah dianggarkan. Jika fungsi anggaran yang digunakan sudah terlihat baik maka anggaran belanja tidak langsung akan menghasilkan tingkat kinerja yang baik. Artinya fungsi anggaran belanja tidak langsung sebagai alat penilaian kinerja sudah baik karena terlihat kecilnya jumlah anggaran belanja yang terealisasi dari yang telah dianggarkan.



## 4.2 Pembahasan

### 4.2.1 Analisis Laporan Realisasi Anggaran Belanja

Anggaran belanja yang dilakukan oleh dinas energi dan sumber daya mineral adalah merupakan suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Anggaran harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pemborosan sumber daya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian, serta harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

Anggaran seringkali disusun berdasarkan target yang diharapkan manajemen pusat sehingga selalu mempertimbangkan kondisi sumber daya yang sulit diprediksi. Anggaran belanja pada dinas energi dan sumber daya mineral juga memiliki andil terjadinya efisien dan ketidakefisien. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan pada anggaran belanjanya maupun pada target realisasinya.

Berikut ini merupakan tabel mengenai realisasi anggaran belanja pada tahun 2013 sampai tahun 2016 yaitu :

**Tabel IV.17**  
**Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2013-2016**

Tahun	Target Anggaran Belanja	Realisasi	%	Keterangan
2013	16.652.628.904	13.727.647.080	82,44	Cukup Efisien
2014	23.949.155.220	21.877.041.294	91,35	Kurang Efisien
2015	27.048.175.000	25.321.876.403	93,62	Kurang Efisien
2016	24.508.016.150	23.035.994.738	93,99	Kurang Efisien

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran belanja pada tahun 2013 sampai tahun 2016 lebih besar dibandingkan dengan target realisasi nya. Dimana pada tahun 2013 tingkat efisien anggaran nya sebesar 82,44 % pada tahun 2014 sebesar 91,35 % , pada tahun 2015 sebesar 93,62 % sedangkan pada tahun 2016 sebesar 93,99 % . Dari hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran belanja pada tahun 2013 sampai tahun 2016 mengalami kenaikan pada tingkat efisiensinya. Dimana pada tahun 2013 bahwa anggaran belanja dapat dikatakan cukup efisien dan sedangkan pada tahun 2014 sampai tahun 2016 anggaran belanja dapat dikatakan kurang efisien.

Dari hasil analisis diatas maka terlihat bahwa secara keseluruhan hampir disemua aktivitas anggaran belanja baik pada belanja langsung maupun belanja tidak langsung telah digunakan sebagai alat mengukur kinerja. Hal ini terlihat dari perbaikan setiap anggaran belanja baik pada anggaran belanja langsung maupun belanja tidak langsung setiap tahunnya.

#### **4.2.2. Analisis Tingkat Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Langsung**

Untuk mengukur pertumbuhan belanja pada belanja langsung yaitu dengan cara mengukur tingkat efisiensi dengan membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan jumlah anggaran belanja langsung. Dimana output target realisasi anggaran belanja langsung dan input merupakan jumlah realisasi belanja langsung.

Berikut ini merupakan tabel mengenai uraian realisasi anggaran belanja langsung pada tahun 2013-2016 yaitu:

**Tabel IV.18**  
**Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2013-2016**

Tahun	Target Anggaran Belanja Langsung	Realisasi Belanja Langsung	%	Keterangan
2013	5.501.125.650	5.442.103.150	98,93	Tidak Efisien
2014	14.410.828.220	13.492.278.850	93,63	Tidak Efisien
2015	17.691.655.000	16.614.478.470	93,91	Tidak Efisien
2016	14.378.579.150	14.035.128.600	97,61	Tidak Efisien

**Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja (Data Olahan)**

Tabel diatas menunjukkan tingkat efisiensi anggaran belanja langsung Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 tingkat efisiensi sebesar 98,93% menjadi 93,63% pada tahun 2014. Dari sudut pandang efisiensi perubahan ini dipandang sebagai penurunan tingkat efisiensi akan tetapi masih dalam kriteria tidak efisien. Pada tahun 2015 mengalami kenaikan tingkat efisien sebesar 0,28% menjadi 93,91% dan memiliki kriteria tidak efisien. Sedangkan pada tahun 2016 mengalami kenaikan tingkat efisien sebesar 97,61% dimana masih memiliki kriteria tidak efisien. Secara keseluruhan, anggaran belanja langsung Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dari tahun 2013 sampai pada tahun 2016 dapat dikatakan masih tidak efisien dengan tingkat efisiensi diatas 90% maka anggaran belanja dapat dikatakan tidak efisien. Menurut teori yang dikemukakan oleh keputusan menteri dalam negeri yang menyatakan bahwa apabila anggaran belanja dapat dikatakan tidak efisien jika hasil pencapaiannya antara 90%-100%. Penelitian ini bertentangan dengan penelitian terdahulu yang dinyatakan oleh Rusita Untari Tahun 2011 yang menyatakan bahwa anggaran belanja langsung tidak efisien

dikarenakan ada salah satu program yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran yang bersangkutan.

#### **4.2.3. Analisis Tingkat Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung**

Untuk mengukur pertumbuhan belanja pada belanja tidak langsung yaitu dengan cara mengukur tingkat efisiensi dengan membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan jumlah anggaran belanja langsung. Dimana output target realisasi anggaran belanja tidak langsung dan input merupakan jumlah realisasi belanja tidak langsung.

Berikut ini merupakan tabel mengenai uraian realisasi anggaran belanja tidak langsung pada tahun 2013-2016 yaitu :

**Tabel IV.19**  
**Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2013-2016**

Tahun	Target Anggaran Belanja Tidak Langsung	Realisasi Belanja Tidak Langsung	%	Keterangan
2013	11.151.503.254	8.285.543.930	74,30	Efisien
2014	9.538.327.000	8.384.762.444	87,91	Cukup Efisien
2015	9.356.520.000	8.707.397.933	93,06	Tidak Efisien
2016	10.129.437.000	9.000.866.138	88,86	Efisien

**Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja (Data Olahan)**

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pada anggaran belanja tidak langsung mengalami fluktuasi setiap tahun nya. Pada tahun 2013 tingkat efisien sebesar 74,30% yang mana pada tahun 2014 menjadi 87,91%. Dari sudut pandang tingkat efisien mengalami perubahan ini dipandang sebagai kenaikan pada tingkat efisiensi, akan tetapi kriteria anggaran belanja masih dikatakan efisien. Pada tahun 2015 tingkat efisien mengalami kenaikan tingkat efisien yang cukup besar sebesar 5,15% menjadi 93,06% dan memiliki kriteria anggaran

belanja masih kurang efisien. Sedangkan pada tahun 2016 tingkat efisien mengalami penurunan sebesar 4,2% sehingga tingkat efisien menjadi 88,86%. Secara keseluruhan bahwa anggaran belanja Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2013 ,2014 dan 2016 masih dikatakan efisien akan tetapi pada tahun 2015 anggaran belanja belum dikatakan efisien dengan tingkat efisiensi diatas 90% maka anggaran tersebut dapat dikatakan tidak efisien. Menurut teori yang dikemukakan oleh keputusan menteri dalam negeri yang menyatakan bahwa apabila anggaran belanja dapat dikatakan kurang efisien jika hasil pencapaiannya antara 90%-100%. Penelitian ini bertentangan dengan penelitian terdahulu yang dinyatakan oleh Rusita Untari Tahun 2011 yang menyatakan bahwa anggaran belanja tidak langsung tidak efisien dikarenakan ada salah satu program yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran yang bersangkutan.

#### **4.2.4. Analisis Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung Dalam Menilai Kinerja.**

Sebelum memulai suatu kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terlebih dahulu membuat suatu rencana mengenai jumlah biaya yang dikeluarkan. Rencana belanja langsung maupun belanja tidak langsung dituangkan dalam bentuk anggaran. Dalam menyusun suatu anggaran belanja langsung maupun belanja tidak langsung terlebih dahulu ditentukan dan disusun berdasarkan peraturan dan standar satuan kegiatan kerja yang akan diberlakukan pada tahun yang akan datang untuk dijadikan acuan oleh atasan maupun para pegawai dalam menyusun anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung.

Belanja langsung maupun belanja tidak langsung yang telah disusun kemudian diajukan kepada atasan. Kemudian dilakukan pembahasan antara atasan

dengan para pegawai, kemudian dilakukan koreksi dan perbaikan terhadap anggaran belanja yang telah disusun tersebut. Hasil pembahasan dirangkum dan kemudian diajukan oleh bagian pusat. Kemudian dilakukan pembahasan antara atasan dengan tim kantor pusat atas hasil pembahasannya yang diajukan kembali ke direksi dan selanjutnya ke bagian komisaris.

Penyusunan anggaran belanja langsung maupun belanja tidak langsung telah sesuai dengan prosedur yang digunakan. Prosedur tersebut dirancang sedemikian rupa agar dapat terhindar dari kesalahan dalam penyusunan anggaran. Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral telah melakukan prosedur yang tepat mengenai anggaran sebagai alat penilaian kinerja. Hal ini terlihat bahwa pihak manajemen maupun pihak keuangan telah mampu melakukan tindakan korektif yang tepat dalam mengetahui berapa anggaran yang dapat dikatakan efisien maupun tidak efisien sehingga anggaran dapat mengalami peningkatan. Namun demikian pihak manajemen maupun pihak keuangan juga harus melakukan analisis mengapa anggaran terjadi ketidakefisienan, hal ini terjadi pada anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Sistem kinerja yang digunakan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sudah dikatakan baik dimana sistem kerjanya sudah menggunakan sistem E yaitu E-Renstra, E-Renja, dan E-Kuangan. Dimana sistem kinerja yang digunakan dengan adanya kontrak kinerja yang akan dibuat suatu laporan berupa laporan tentang kinerja yang kemudian laporan tersebut di evaluasi oleh pihak manajemen dan pihak keuangan dan hal tersebut akan terlihat target kinerja yang dicapai oleh pegawai sudah baik dan efisien apa belum.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang dapat penulis ambil dari pembahasan pada bab terdahulu antara lain :

1. Fungsi anggaran yang digunakan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara sudah dikatakan baik dan efisien. Dimana tahapan maupun prosedur yang dilakukan dalam menyusun suatu anggaran belanja sudah sesuai dengan peraturan dan standar kinerja yang digunakan. Sehingga kinerja manajemen maupun pihak keuangan telah mampu melakukan tindakan korektif dan perbaikan sehingga anggaran tidak terjadi ketidakefisienan.
2. Penilaian kinerja yang diukur dengan menggunakan rasio efisiensi. yang dikatakan efisien jika anggaran belanja dibawah 60% maka anggaran belanja dapat dikatakan efisien dan otomatis penilaian kinerjapun juga dikatakan baik dan efisien. Kinerja yang sudah dikatakan efisien itu terlihat dari kecilnya jumlah anggaran belanja yang terealisasi dari yang telah dianggarkan sehingga Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan penghematan dengan nilai yang wajar.
3. Anggaran belanja tidak langsung maupun belanja langsung pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2013-2016, secara keseluruhan sudah diolah secara efisien. Akan tetapi hanya sebagian saja yang terlihat efisien dalam perhitungan anggarannya. Dengan hal tersebut pengelolaan

anggaran belanja sudah memenuhi syarat efisiensi yaitu dengan penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil yang maksimum.

## 5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu:

1. Bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral perlu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran belanja langsung maupun belanja tidak langsung ditahun-tahun selanjutnya agar pencapaian suatu kegiatan ataupun program sesuai yang diharapkan dan mencapai tujuan.
2. Bagi Peneliti selanjutnya, agar menjadi acuan dan peneliti diharapkan agar peneliti selanjutnya dapat meneliti anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung setiap tahunnya dan meneliti tentang proses jalannya suatu program kegiatan dan program kerja anggaran belanja yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
3. Anggaran harus diawasi dengan teliti, ketat, dan cermat sehingga apabila penyimpangan terjadi maka pihak manajemen harus segera menganalisis guna memahami mengapa realisasi tersebut bisa berbeda dengan anggaran. Analisis tersebut harus diikuti dengan tindak lanjut oleh pimpinan atau atasan dan tindakan apa yang perlu diambil dalam menghadapi penyimpangan tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ariel Sharon Sumange. (2013). “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Minahasa Selatan”. *Jurnal Emba* Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol. 1 No. 3, September 2013, Hal.74-81.
- Christover,Linda,Enneke. (2017).”Analisis efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara”. *Jurnal Emba* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol. 5 No. 2, Juni 2017,Hal.1260-1270
- Deddi Nordiawan. (2009). *Akuntansi Pemerintahan*.Jakarta: Salemba Empat
- Eka,et al. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*.Edisi 1.Medan: Perdana Mulya Sarana
- Hardianti,Jantje J,Robert. (2016). “Evaluasi Penerapan Akuntansi Belanja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Selatan”. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol. 16 No. 03,2016.
- Indra Bastian. (2002). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*.Edisi 1.Jakarta: Salemba Empat.
- Indra Bastian. (2007). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*.Edisi 2.Jakarta: Salemba Empat.
- Muindro Renyowijoya. (2013). *Akuntansi Sektor Publik,Organisasi Non Laba*.Edisi 3.Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Rusita Untari. (2011). "Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang" *Jurnal Akuntansi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Semarang.
- Retno Sundari. (2013). "Analisis Pengaruh Belanja Langsung Terhadap Capaian Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten". *Artikel Publikasi Ilmiah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sri Devi Octaviani. (2009)." Analisis Komposisi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Pada Pemerintah Kabupaten Langkat". *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Edisi Revisi Bandung: Penerbit CV alfabeta.
- Syurtika, Ventje, Inggriani. (2014)."Analisis Belanja Langsung Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara" *Jurnal Emba* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol. 2 No. 3, September 2014, Hal.952-961.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : MEGA AULIA  
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 02 Mei 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SMA DHARMAWANGSA  
Alamat : Jln. Perbatasan Gang. Hidayah No. 27-D  
No. Tlp/Hp : 0821-6793-9820

### Nama Orang Tua

Ayah : Pamuji Anto  
Ibu : Bariyah  
Alamat : Jln. Perbatasan Gang. Hidayah No. 27-D

### Pendidikan

Tahun 2002-2008 : SD Negeri 060870 Medan  
Tahun 2008-2011 : SMP Swasta Laksamana Martadinata  
Tahun 2011-2014 : SMA Dharmawangsa  
Tahun 2014-2018 : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Yang menyatakan

Mega Aulia

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MEGA AULIA  
NPM : 1405170691  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS FUNGSI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SEBAGAI ALAT PENILAIAN KINERJA PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA UTARA

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA UTARA.


Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan,     Maret 2018

Yang membuat pernyataan



  
MEGA AULIA

### Pertanyaan Wawancara

Nama : ILHAM .,ST  
NIP : 197605062006041003  
Jabatan : Kasubbag Program,Akuntabilitas dan Informasi Publik  
Tempat : Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provsu  
Hari/Tanggal : Senin,05 Maret 2018

1. Apakah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sudah menggunakan delapan fungsi utama anggaran sektor publik? Jika iya,Jelaskan?  
Jawab: Iya sudah,Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sudah menggunakan delapan fungsi utama anggaran sektor publik.Dimana dinas ESDM dari sisi perencanaan sudah menerapkan sistem E yaitu E-Renstra → E-Renja → E-Kuangan artinya sudah tidak memakai sistem manual.
2. Fungsi anggaran apa yang digunakan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara?  
Jawab: Semua fungsi anggaran yang digunakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Apakah fungsi anggaran yang ada pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara sudah dikatakan baik dan efisien?  
Jawab: Fungsi anggaran yang ada pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sudah dikatakan baik dan efisien
4. Bagaimana cara menentukan dan menetapkan suatu anggaran dapat menghasilkan nilai yang efisien?  
Jawab: Cara menentukan dan menetapkan suatu anggaran dapat menghasilkan nilai yang efisien yaitu dengan cara menentukan target yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan dimana anggaran disusun dengan cara sistematis dan benar sehingga menghasilkan nilai yang efisien,Hal ini juga berkaitan dengan target kinerja untuk menyusun suatu anggaran

dimana kontrak kinerja lah sebagai acuan untuk mencapai suatu target anggaran yang menghasilkan nilai yang baik dan efisien.

5. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi dalam penyusunan anggaran?

Jawab: Faktor yang mempengaruhi dalam menyusun suatu anggaran tersebut yaitu -Faktor Intern

-dan Faktor Ekstern

6. Apakah ada suatu program atau kegiatan yang belum dilaksanakan pada tahun anggaran yang telah ditetapkan?

Jawab: Program dalam menyusun anggaran itu pasti ada dimana program kegiatan yang terdapat di E-Renja tidak semua tertampung di dalam E-keuangan itu tergantung pada skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Sedangkan suatu kegiatan itu biasanya tidak ada. Akan tetapi jika suatu program dan kegiatan sudah direncanakan akan tetapi belum masuk kedalam E-Renja tetapi di DPA itu tidak ada itu hal yang biasa akan tetapi jika sudah dianggarkan dan sudah masuk kedalam DPA tetapi tidak dilaksanakan itu salah.

7. Apakah setiap tahun program suatu kegiatan dalam menyusun anggaran tidak sama dengan tahun sebelumnya? Bila tidak, Mengapa?

Jawab: Program suatu kegiatan dalam menyusun anggaran pasti tidak sama setiap tahun karena sesuai dengan kebutuhan.

8. Adakah kesulitan yang dihadapi ketika menyusun laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah?

Jawab: Kesulitan dalam menyusun laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pasti ada sedikit kesulitan dalam menyusun nya karena dalam menyusun anggaran harus sesuai dengan target dan standart untuk menyusun nya tidak bisa sembarangan dalam menyusun suatu anggaran harus benar-benar teliti, dan cermat sehingga tidak terjadi kesalahan.

9. Bagaimana cara menentukan dan menetapkan anggaran belanja daerah dapat dikatakan efisien?

Jawab: Belanja Daerah sudah dikatakan efisien, Cara menentukan dan menetapkan suatu anggaran belanja daerah dengan menghitung berapa besar antara realisasi anggaran dengan target anggaran belanja dimana anggaran belanja dapat dikatakan efisien dengan melihat apakah ada suatu standart atau peraturan yang digunakan untuk mengkategorikan belanja daerah itu efisien. Hal ini berdasarkan peraturan menteri dalam negeri

nomor 690.900-327 Tahun 1996 mengenai tingkat efisiensi anggaran belanja.

10. Apakah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menggunakan kriteria atau standart untuk melihat berapa besar tingkat efisien anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dapat dikatakan baik dan efisien?

Jawab: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menggunakan standart untuk melihat besar tingkat efisien anggaran belanja dengan menggunakan kontrak kinerja sebagai acuannya.

11. Bagaimana pengawasan yang ada terhadap anggaran belanja daerah baik pada anggaran belanja langsung maupun belanja tidak langsung?

Jawab: Pengawasan sudah dilakukan dengan baik dimana pengawasan dilakukan melalui Intern( Ekspektorat) dan Ekstern (BPK)

12. Apakah ada peraturan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara mengenai belanja daerah baik pada belanja langsung maupun belanja tidak langsung?

Jawab: Peraturan yang digunakan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai belanja daerah dengan menggunakan PERDA APBD (Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), kemudian berdasarkan PSAP (Peraturan Standart Akuntansi Pemerintah)

13. Apa yang menyebabkan jika suatu target anggaran belanja mengalami kenaikan atau penurunan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral?

Jawab: Jika suatu target anggaran belanja mengalami defisit dikarenakan penggunaan terlalu besar sehingga mengeluarkan dana yang cukup besar, kemudian subsidi yang tidak tepat sasaran artinya dalam mencapai suatu anggaran yang diinginkan tidak tercapai sesuai dengan target yang diinginkan.

14. Jika realisasi anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung tidak mencapai suatu target yang diinginkan, bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?

Jawab: Belum pernah anggaran pada belanja langsung maupun belanja tidak langsung tidak tercapai selama ini selalu tercapai target anggaran belanjanya.

15. Apa saja upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan realisasi anggaran belanja langsung dan tidak langsung?





**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**SKPD : 2.03.01. - DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013**

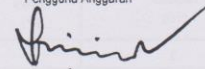
1-3

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Prognosis	Ket.
2	3	4	5	6	7
<b>PENDAPATAN</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	-	-	
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	-	-	
Hasil Retribusi Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
Retribusi Jasa Umum	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
<b>JUMLAH</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	-	-	
<b>BELANJA</b>	<b>16.652.628.904,00</b>	<b>13.727.647.080,00</b>	<b>2.924.981.824,00</b>	-	
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>11.151.503.254,00</b>	<b>8.285.543.930,00</b>	<b>2.865.959.324,00</b>	-	
<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>11.151.503.254,00</b>	<b>8.285.543.930,00</b>	<b>2.865.959.324,00</b>	-	
Gaji dan Tunjangan	6.551.503.254,00	5.766.543.930,00	784.959.324,00	-	
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.916.347.483,00	4.368.277.780,00	548.069.703,00	-	
Tunjangan Keluarga	514.459.855,00	456.622.853,00	57.837.002,00	-	
Tunjangan Jabatan	174.180.000,00	167.830.000,00	6.350.000,00	-	
Tunjangan Fungsional	87.957.663,00	62.725.000,00	25.232.663,00	-	
Tunjangan Fungsional Umum	264.252.631,00	224.140.000,00	40.112.631,00	-	
Tunjangan Beras	397.186.977,00	324.607.290,00	72.579.687,00	-	
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	88.399.455,00	75.997.706,00	12.401.749,00	-	
Pembulatan Gaji	103.695,00	103.313,00	382,00	-	
Iuran Asuransi Kesehatan	108.615.495,00	86.239.988,00	22.375.507,00	-	
Tambahan Penghasilan PNS	4.600.000.000,00	2.519.000.000,00	2.081.000.000,00	-	
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	4.600.000.000,00	2.519.000.000,00	2.081.000.000,00	-	
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>5.501.125.650,00</b>	<b>5.442.103.150,00</b>	<b>59.022.500,00</b>	-	
<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>518.195.000,00</b>	<b>510.496.000,00</b>	<b>7.699.000,00</b>	-	
Honorarium PNS	381.825.000,00	377.845.000,00	3.980.000,00	-	
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	121.970.000,00	119.950.000,00	2.020.000,00	-	
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	15.375.000,00	14.915.000,00	460.000,00	-	
Honorarium Personil / Narasumber	129.000.000,00	127.500.000,00	1.500.000,00	-	
Honorarium Pengelola Kegiatan	110.260.000,00	110.260.000,00	-	-	
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.220.000,00	5.220.000,00	-	-	
Honorarium Non PNS	88.260.000,00	85.100.000,00	3.160.000,00	-	
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	78.150.000,00	78.150.000,00	-	-	
Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	10.110.000,00	6.950.000,00	3.160.000,00	-	
Uang Lembur	48.110.000,00	47.551.000,00	559.000,00	-	
Uang Lembur PNS	48.110.000,00	47.551.000,00	559.000,00	-	
<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.734.190.650,00</b>	<b>3.683.897.150,00</b>	<b>50.293.500,00</b>	-	
Belanja Bahan Pakai Habis	148.069.400,00	147.148.800,00	920.600,00	-	
Belanja Alat Tulis Kantor	82.371.900,00	81.738.400,00	633.500,00	-	
Belanja dokumen/administrasi tender	1.400.000,00	1.395.400,00	4.600,00	-	
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	12.000.000,00	11.991.500,00	8.500,00	-	
Belanja peranko, material dan benda pos lainnya	7.714.500,00	7.710.000,00	4.500,00	-	

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Prognosis	Ket.
2	3	4	5	6	7
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	44.583.000,00	44.313.500,00	269.500,00	-	-
Belanja Bahan/Material	28.000.000,00	27.972.500,00	27.500,00	-	-
Belanja Dekorasi	22.000.000,00	21.997.500,00	2.500,00	-	-
Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	975.000,00	25.000,00	-	-
Belanja bahan publikasi	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-
Belanja bahan percontohan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-
Belanja Jasa Kantor	550.248.000,00	539.218.000,00	11.030.000,00	-	-
Pembayaran pajak	10.548.000,00	5.717.800,00	4.830.200,00	-	-
Belanja telepon	10.400.000,00	8.616.050,00	1.783.950,00	-	-
Belanja air	15.600.000,00	12.407.400,00	3.192.600,00	-	-
Belanja listrik	74.400.000,00	74.400.000,00	-	-	-
Belanja surat kabar/majalah	10.000.000,00	9.686.000,00	314.000,00	-	-
Belanja kawat/laksimili/internet	20.800.000,00	20.799.750,00	250,00	-	-
Belanja Sertifikasi	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-
Belanja Jasa Transaksi Keuangan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	-
Belanja Jasa Pihak Ketiga	354.500.000,00	353.620.000,00	880.000,00	-	-
Belanja Transportasi dan Akomodasi	37.000.000,00	36.971.000,00	29.000,00	-	-
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	42.000.000,00	32.209.850,00	9.790.150,00	-	-
Belanja Jasa Service	8.500.000,00	8.499.500,00	500,00	-	-
Belanja Penggantian Suku Cadang	14.000.000,00	13.999.500,00	500,00	-	-
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	19.500.000,00	9.710.850,00	9.789.150,00	-	-
Belanja Cetak dan Penggandaan	47.714.050,00	46.316.350,00	1.397.700,00	-	-
Belanja cetak	36.646.000,00	35.967.500,00	678.500,00	-	-
Belanja Penggandaan	11.068.050,00	10.348.850,00	719.200,00	-	-
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	99.500.000,00	99.500.000,00	-	-	-
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	99.500.000,00	99.500.000,00	-	-	-
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	26.600.000,00	26.600.000,00	-	-	-
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	26.600.000,00	26.600.000,00	-	-	-
Belanja Makanan dan Minuman	71.290.000,00	71.135.000,00	155.000,00	-	-
Belanja makanan dan minuman harian pegawai	13.320.000,00	13.307.500,00	12.500,00	-	-
Belanja makanan dan minuman rapat	14.210.000,00	14.085.000,00	125.000,00	-	-
Belanja makanan dan minuman tamu	43.760.000,00	43.742.500,00	17.500,00	-	-
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	35.223.000,00	35.223.000,00	-	-	-
Belanja pakaian KORPRI	35.223.000,00	35.223.000,00	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas	2.680.086.200,00	2.653.123.650,00	26.962.550,00	-	-
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.030.931.000,00	2.015.335.000,00	15.596.000,00	-	-
Belanja perjalanan dinas luar daerah	649.155.200,00	637.788.650,00	11.366.550,00	-	-
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	5.460.000,00	5.450.000,00	10.000,00	-	-
Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	5.460.000,00	5.450.000,00	10.000,00	-	-
BELANJA MODAL	1.248.740.000,00	1.247.710.000,00	1.030.000,00	-	-
Belanja Modal Pengadaan Komputer	51.250.000,00	50.550.000,00	700.000,00	-	-
Belanja modal Pengadaan komputer note book	46.550.000,00	46.050.000,00	500.000,00	-	-
Belanja modal Pengadaan printer	4.700.000,00	4.500.000,00	200.000,00	-	-
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	591.951.000,00	591.951.000,00	-	-	-
Belanja modal pengadaan konstruksi sumur bor	591.951.000,00	591.951.000,00	-	-	-
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	539.539.000,00	539.539.000,00	-	-	-
Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	539.539.000,00	539.539.000,00	-	-	-
Belanja Modal Sarana Dan Prasarana	66.000.000,00	65.670.000,00	330.000,00	-	-

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Prognosis	Ket.
2	3	4	5	6	7
Belanja Modal Sarana dan Prasarana	66.000.000,00	65.670.000,00	330.000,00	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>16.652.628.904,00</b>	<b>13.727.647.080,00</b>	<b>2.924.981.824,00</b>	-	-
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(16.648.628.904,00)</b>	<b>(13.723.647.080,00)</b>	<b>(2.924.981.824,00)</b>	-	-

Pengguna Anggaran



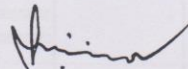
Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si, MAP  
NIP : 19630602 199003 1 003

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
SKPD : 2.03.01. - DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013

1-1

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2013	Persen (%)	Realisasi 2012
2	3	4	5	6
PENDAPATAN DAERAH	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	-
PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	-
Hasil Retribusi Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	-
JUMLAH	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	-
BELANJA DAERAH	16.652.628.904,00	13.727.647.080,00	82,44	-
BELANJA OPERASI	15.403.888.904,00	12.479.937.080,00	81,02	-
1. Belanja Pegawai	11.669.698.254,00	8.796.039.930,00	75,38	-
2. Belanja Barang dan Jasa	3.734.190.650,00	3.683.897.150,00	98,65	-
BELANJA MODAL	1.248.740.000,00	1.247.710.000,00	99,92	-
Peralatan dan mesin	51.250.000,00	50.550.000,00	98,63	-
Gedung dan Bangunan	66.000.000,00	65.670.000,00	99,50	-
Jalan, irigasi dan jaringan	1.131.490.000,00	1.131.490.000,00	100,00	-
JUMLAH	16.652.628.904,00	13.727.647.080,00	82,44	-
SURPLUS/(DEFISIT)	(16.648.628.904,00)	(13.723.647.080,00)	82,43	-

KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN  
ENERGI



Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si, MAF  
Nip. 19630602 199003 1 003

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
SKPD : 2.03.01. - DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014

1-4

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Prognosis	Ket.
2	3	4	5	6	7
<b>PENDAPATAN</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		-
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		-
Hasil Retribusi Daerah	5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00		-
Retribusi Jasa Umum	5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00		-
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00		-
<b>JUMLAH</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		-
<b>BELANJA</b>	<b>23.948.166.220,00</b>	<b>21.877.041.294,00</b>	<b>2.072.113.926,00</b>		-
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>9.538.327.000,00</b>	<b>8.384.762.444,00</b>	<b>1.153.564.556,00</b>		-
<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>9.538.327.000,00</b>	<b>8.384.762.444,00</b>	<b>1.153.564.556,00</b>		-
Gaji dan Tunjangan	7.006.327.000,00	5.889.824.944,00	1.116.502.056,00		-
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.210.233.200,00	4.467.032.140,00	743.201.060,00		-
Tunjangan Keluarga	544.369.800,00	454.249.318,00	90.120.482,00		-
Tunjangan Jabatan	250.083.000,00	231.610.000,00	18.473.000,00		-
Tunjangan Fungsional	100.147.700,00	64.350.000,00	35.797.700,00		-
Tunjangan Fungsional Umum	267.088.900,00	194.140.000,00	72.948.900,00		-
Tunjangan Beras	388.675.800,00	259.200.000,00	127.675.800,00		-
Tunjangan PPI/Tunjangan Khusus	95.706.700,00	87.004.066,00	8.702.634,00		-
Pembulatan Gaji	122.900,00	81.382,00	41.518,00		-
Iuran Asuransi Kesehatan	151.698.000,00	132.158.038,00	19.540.962,00		-
Tambahan Penghasilan PNS	2.532.000.000,00	2.494.937.500,00	37.062.500,00		-
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.532.000.000,00	2.494.937.500,00	37.062.500,00		-
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>14.410.839.220,00</b>	<b>13.492.278.850,00</b>	<b>918.549.370,00</b>		-
<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>957.930.000,00</b>	<b>849.915.000,00</b>	<b>108.015.000,00</b>		-
Honorarium PNS	911.090.000,00	835.150.000,00	75.940.000,00		-
Honorarium Tim Pengabdian Masyarakat	10.000.000,00	7.880.000,00	2.120.000,00		-
Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	126.210.000,00	126.210.000,00	-		-
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	6.120.000,00	6.120.000,00	-		-
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	21.140.000,00	21.140.000,00	-		-
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	664.350.000,00	631.850.000,00	32.500.000,00		-
Honorarium Tim Pengabdian Masyarakat dan Jasa	82.870.000,00	41.950.000,00	40.920.000,00		-
Honorarium Non PNS	30.500.000,00	-	30.500.000,00		-
Honorarium Pegawai Non PNS	28.000.000,00	-	28.000.000,00		-
Honorarium Pegawai Honorier/tidak tetap	2.500.000,00	-	2.500.000,00		-
Uang Lembur	16.340.000,00	14.765.000,00	1.575.000,00		-
Uang Lembur PNS	16.340.000,00	14.765.000,00	1.575.000,00		-
<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>11.306.518.400,00</b>	<b>10.701.858.850,00</b>	<b>604.659.550,00</b>		-
Belanja Bahan Pakai Habis	248.554.800,00	230.688.950,00	17.865.850,00		-
Belanja Alat Tulis Kantor	77.714.800,00	76.838.450,00	876.350,00		-
Belanja dokumentasi administrasi tender	930.000,00	-	930.000,00		-
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	30.000.000,00	29.955.400,00	44.600,00		-

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Prognosis	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	14.400.000,00	14.400.000,00	✓		
1.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Ces	125.510.000,00	109.495.100,00	✓	16.014.900,00	
1.02	Belanja Bahan/Material	356.870.000,00	342.996.000,00	✓	13.874.000,00	
1.06	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	7.250.000,00	7.240.000,00	✓	10.000,00	
1.07	Belanja Bahan Dekorasi	79.620.000,00	66.656.000,00	✓	12.964.000,00	
1.01	Belanja bahan baku bangunan	255.000.000,00	254.100.000,00	✓	900.000,00	
1.05	Belanja bahan kimia dan Pupuk	15.000.000,00	15.000.000,00	✓		
1.03	Belanja Jasa Kelembagaan	666.925.000,00	655.394.800,00	✓	43.530.200,00	
1.16	Belanja Jasa Kegiatan Tertentu	✓ 85.300.000,00	✓ 84.748.000,00	✓	562.000,00	
1.12	Belanja Jasa Kebersihan	✓ 190.000.000,00	✓ 189.600.000,00	✓	400.000,00	
1.13	Belanja Jasa Keamanan Kantor	✓ 180.000.000,00	✓ 179.820.000,00	✓	180.000,00	
1.01	Belanja telepon	13.200.000,00	9.514.900,00	✓	3.685.100,00	
1.02	Belanja air	22.800.000,00	9.847.300,00	✓	12.952.700,00	
1.05	Belanja listrik	114.000.000,00	112.161.400,00	✓	1.838.600,00	
1.04	Belanja Jasa pengumuman kelang/pemegang kelang	9.250.000,00		✓	9.250.000,00	
1.05	Belanja surat kabar/majalah	✓ 20.000.000,00	✓ 17.644.500,00	✓	2.355.500,00	
1.06	Belanja kawat/faksimili/internet/intranet/TV Kabel/TV Satelit	✓ 23.400.000,00	✓ 22.005.550,00	✓	1.394.450,00	
1.08	Belanja Sertifikasi	✓ 8.500.000,00	✓	✓	8.500.000,00	
1.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	✓ 32.475.000,00	✓ 30.053.150,00	✓	2.421.850,00	
1.01	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	34.490.000,00	21.238.150,00	✓	13.251.850,00	
1.01	Belanja Jasa Service	✓ 8.820.000,00	✓ 2.602.000,00	✓	6.218.000,00	
1.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	14.420.000,00	✓ 14.416.350,00	✓	3.650,00	
1.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	✓ 11.250.000,00	✓ 4.219.800,00	✓	7.030.200,00	
1.01	Belanja Cetak dan Pengandaan	137.379.800,00	120.931.900,00	✓	16.447.700,00	
1.02	Belanja cetak	✓ 96.292.400,00	✓ 86.671.000,00	✓	11.651.400,00	
1.02	Belanja Pengandaan	✓ 39.157.200,00	✓ 34.360.900,00	✓	4.796.300,00	
1.02	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.100.000,00	8.030.000,00	✓	70.000,00	
1.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	✓ 8.100.000,00	✓ 8.030.000,00	✓	70.000,00	
1.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.500.000,00	4.785.000,00	✓	715.000,00	
1.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	✓ 5.500.000,00	✓ 4.785.000,00	✓	715.000,00	
1.01	Belanja Makanan dan Minuman	116.352.000,00	109.243.000,00	✓	7.109.000,00	
1.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	✓ 22.632.000,00	✓ 22.594.000,00	✓	38.000,00	
1.02	Belanja makanan dan minuman rapat	✓ 79.220.000,00	✓ 72.187.000,00	✓	7.033.000,00	
1.03	Belanja makanan dan minuman tamu	✓ 14.500.000,00	✓ 14.462.000,00	✓	38.000,00	
1.04	Belanja Pakain Dinas dan Atributnya	56.250.000,00	55.875.000,00	✓	375.000,00	
1.04	Belanja Pakain Dinas Harian (PDH)	✓ 56.250.000,00	✓ 55.875.000,00	✓	375.000,00	
1.03	Belanja Pakain khusus dan hari-hari tertentu	81.250.000,00	80.850.000,00	✓	400.000,00	
1.03	Belanja pakaian batik tradisional	✓ 81.250.000,00	✓ 80.850.000,00	✓	400.000,00	
1.03	Belanja Perjalanan Dinas	3.859.893.000,00	3.474.290.550,00	✓	395.402.450,00	
1.02	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	✓ 2.603.666.000,00	✓ 2.525.060.000,00	✓	78.606.000,00	
1.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	✓ 1.116.200.000,00	✓ 949.230.550,00	✓	166.969.450,00	
1.02	Belanja perjalanan dinas luar negeri	✓ 139.828.000,00	✓	✓	139.828.000,00	
1.02	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	✓ 42.554.000,00	✓ 35.354.000,00	✓	7.200.000,00	
1.02	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	42.554.000,00	35.354.000,00	✓	7.200.000,00	
1.02	Belanja Pemeliharaan	✓ 76.000.000,00	✓ 75.713.500,00	✓	286.500,00	
1.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Non kapitalisasi)	✓ 76.000.000,00	✓ 75.713.500,00	✓	286.500,00	
1.01	Belanja Jasa Konsultansi	507.600.000,00	501.371.000,00	✓	6.229.000,00	

Memor Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Prognosis	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
2022.54	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	✓ 17.600.000,00	✓ 14.000.000,00	✓ 3.600.000,00	-	-
2022.55	Belanja Jasa Konsultansi/Pejabat Ahli	✓ 460.000.000,00	✓ 487.371.000,00	✓ 2.629.000,00	-	-
2022.56	Belanja Barang Yang Akan diserahkan Kepada Masyarakat Pihak Ketiga	✓ 5.077.000.000,00	✓ 4.985.097.000,00	✓ 91.903.000,00	-	-
2022.57	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	✓ 2.900.000.000,00	✓ 2.723.102.000,00	✓ 176.898.000,00	-	-
2022.58	Belanja Barang Yang Akan diserahkan Kepada Masyarakat pada SKPD.	✓ 2.277.000.000,00	✓ 2.261.995.000,00	✓ 15.005.000,00	-	-
	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.146.379.820,00</b>	<b>1.940.505.000,00</b>	<b>205.874.820,00</b>	-	-
2022.59	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	✓ 130.000.000,00	✓ 128.500.000,00	✓ 1.500.000,00	-	-
2022.60	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemboran Air Tanah	✓ 130.000.000,00	✓ 128.500.000,00	✓ 1.500.000,00	-	-
2022.61	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	✓ 1.450.000.000,00	✓ 1.251.000.000,00	✓ 199.000.000,00	-	-
2022.62	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	✓ 1.450.000.000,00	✓ 1.251.000.000,00	✓ 199.000.000,00	-	-
2022.63	Belanja Modal Pengadaan Perlatan Kantor	✓ 103.000.000,00	✓ 102.498.000,00	✓ 502.000,00	-	-
2022.64	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	✓ 32.500.000,00	✓ 32.340.000,00	✓ 160.000,00	-	-
2022.65	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	✓ 24.000.000,00	✓ 23.958.000,00	✓ 42.000,00	-	-
2022.66	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Lainnya	✓ 46.500.000,00	✓ 46.200.000,00	✓ 300.000,00	-	-
2022.67	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	✓ 35.100.000,00	✓ 34.903.000,00	✓ 197.000,00	-	-
2022.68	Belanja modal Pengadaan almari	✓ 30.800.000,00	✓ 30.448.000,00	✓ 352.000,00	-	-
2022.69	Belanja modal Pengadaan filing kabinet	✓ 4.500.000,00	✓ 4.455.000,00	✓ 45.000,00	-	-
2022.70	Belanja Modal Pengadaan Komputer	✓ 92.079.820,00	✓ 88.738.000,00	✓ 2.341.820,00	-	-
2022.71	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	✓ 40.500.000,00	✓ 40.392.000,00	✓ 108.000,00	-	-
2022.72	Belanja modal Pengadaan komputer note book	✓ 19.000.000,00	✓ 18.898.000,00	✓ 102.000,00	-	-
2022.73	Belanja modal Pengadaan printer	✓ 21.579.820,00	✓ 20.858.000,00	✓ 721.820,00	-	-
2022.74	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	✓ 11.000.000,00	✓ 9.790.000,00	✓ 1.210.000,00	-	-
2022.75	Belanja Modal Pengadaan meubelair	✓ 14.500.000,00	✓ 14.377.000,00	✓ 123.000,00	-	-
2022.76	Belanja modal Pengadaan meja kerja	✓ 14.500.000,00	✓ 14.377.000,00	✓ 123.000,00	-	-
2022.77	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	✓ 5.000.000,00	✓ 4.950.000,00	✓ 50.000,00	-	-
2022.78	Belanja modal Pengadaan dispenser	✓ 5.000.000,00	✓ 4.950.000,00	✓ 50.000,00	-	-
2022.79	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tinggi	✓ 73.500.000,00	✓ 73.000.000,00	✓ 500.000,00	-	-
2022.80	Belanja Modal Pengadaan Karpet	✓ 73.500.000,00	✓ 73.000.000,00	✓ 500.000,00	-	-
2022.81	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	✓ 2.100.000,00	✓ 2.090.000,00	✓ 10.000,00	-	-
2022.82	Belanja modal Pengadaan kamera	✓ 2.100.000,00	✓ 2.090.000,00	✓ 10.000,00	-	-
2022.83	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	✓ 185.000.000,00	✓ 184.552.000,00	✓ 448.000,00	-	-
2022.84	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia	✓ 185.000.000,00	✓ 184.552.000,00	✓ 448.000,00	-	-
2022.85	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	✓ 56.100.000,00	✓ 54.897.000,00	✓ 1.203.000,00	-	-
2022.86	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi	✓ 15.000.000,00	✓ 15.000.000,00	✓ -	-	-
2022.87	Belanja modal Pengadaan peta/atlas/globe	✓ 41.100.000,00	✓ 39.897.000,00	✓ 1.203.000,00	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>23.949.155.220,00</b>	<b>21.877.841.294,00</b>	<b>2.072.113.926,00</b>	-	-
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(23.944.155.220,00)</b>	<b>(21.871.841.294,00)</b>	<b>(2.071.113.926,00)</b>	-	-



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

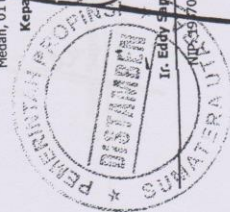
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

Urusan Pemerintahan : 2  
 Bidang Pemerintahan : 2.03  
 Unit Organisasi : 2.03.01  
 Sub Unit Organisasi : 2.03.01.01

Urusan Pilihan  
 Energi dan Sumberdaya Mineral  
 Dinas Pertambangan dan Energi  
 Dinas Pertambangan dan Energi

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2015		REALISASI 2015		REALISASI 2014
					(%)	
4	<b>PENDAPATAN - LRA</b>		36.400.000,00	69.400.000,00	190,66	6.000.000,00
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA</b>		36.400.000,00	69.400.000,00	190,66	6.000.000,00
4.1.1	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA		36.400.000,00	69.400.000,00	190,66	6.000.000,00
5	<b>BELANJA</b>	27.048.175.000,00	25.321.876.403,00	25.321.876.403,00	93,62	21.877.041.294,00
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	26.329.775.000,00	24.611.549.403,00	24.611.549.403,00	93,47	19.936.536.294,00
5.1.1	Belanja Pegawai	9.372.860.000,00	8.721.807.933,00	8.721.807.933,00	93,05	8.399.527.444,00
5.1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	16.956.915.000,00	15.889.741.470,00	15.889.741.470,00	93,71	11.537.008.850,00
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	718.400.000,00	710.327.000,00	710.327.000,00	98,88	1.940.505.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	703.400.000,00	695.387.000,00	695.387.000,00	98,86	1.885.608.000,00
5.2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.000.000,00	14.940.000,00	14.940.000,00	99,60	54.897.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		(27.011.775.000,00)	(25.252.476.403,00)	93,49	(21.871.041.294,00)
	<b>SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN (SILPA)</b>		(27.011.775.000,00)	(25.252.476.403,00)	93,49	(21.871.041.294,00)

Medan, 01 Desember 2015  
 Kepala Dinas



Ir. Eddy Suputra Salim, M.Si  
 005-39706051987031012



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015**



Urusan Pemerintahan : 2  
 Bidang Pemerintahan : 2.03  
 Unit Organisasi : 2.03.01  
 Sub Unit Organisasi : 2.03.01.01

Urusan Pilihan  
 Energi dan Sumberdaya Mineral  
 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2016			REALISASI 2016			REALISASI 2015			
1	<b>PENDAPATAN</b>										
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>										
1.1.1	Pendapatan Retribusi Daerah	120.000.000,00	120.000.000,00	139.000.000,00	139.000.000,00	139.000.000,00	139.000.000,00	139.000.000,00	139.000.000,00	139.000.000,00	115,83
1.1.2		24.508.016.150,00	24.508.016.150,00	23.035.994.738,00	23.035.994.738,00	23.035.994.738,00	23.035.994.738,00	23.035.994.738,00	23.035.994.738,00	23.035.994.738,00	93,99
2	<b>BELANJA</b>	24.032.201.150,00	24.032.201.150,00	22.570.951.738,00	22.570.951.738,00	22.570.951.738,00	22.570.951.738,00	22.570.951.738,00	22.570.951.738,00	22.570.951.738,00	93,92
2.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	11.018.437.000,00	11.018.437.000,00	9.715.506.138,00	9.715.506.138,00	9.715.506.138,00	9.715.506.138,00	9.715.506.138,00	9.715.506.138,00	9.715.506.138,00	88,17
2.1.1	Belanja Pegawai	13.013.764.150,00	13.013.764.150,00	12.855.445.600,00	12.855.445.600,00	12.855.445.600,00	12.855.445.600,00	12.855.445.600,00	12.855.445.600,00	12.855.445.600,00	98,78
2.1.2	Belanja Barang	475.815.000,00	475.815.000,00	465.043.000,00	465.043.000,00	465.043.000,00	465.043.000,00	465.043.000,00	465.043.000,00	465.043.000,00	97,74
2.2	<b>BELANJA MODAL</b>	450.815.000,00	450.815.000,00	440.490.000,00	440.490.000,00	440.490.000,00	440.490.000,00	440.490.000,00	440.490.000,00	440.490.000,00	97,71
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	25.000.000,00	24.553.000,00	24.553.000,00	24.553.000,00	24.553.000,00	24.553.000,00	24.553.000,00	24.553.000,00	98,21
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	(24.388.016.150,00)	(24.388.016.150,00)	(22.896.994.738,00)	(22.896.994.738,00)	(22.896.994.738,00)	(22.896.994.738,00)	(22.896.994.738,00)	(22.896.994.738,00)	(22.896.994.738,00)	93,89
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>										
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>										

Medan, 11 Januari 2016  
 Kepala Dinas

*[Signature]*  
 Ir. Eddy Saputra Salim, M.Si  
 NIP. 195706051987031012

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

Medan, 19 November 2017

M

Agenda Yth,  
Dekan Jurusan  
Fakultas Ekonomi UMSU

Medan

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Yang hormat,  
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MEGA AULIA  
NPM : 1405170201  
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN  
Kelas/Semester : VII-E AKUNTANSI / XII

Merencanakan pengajuan judul untuk pembuatan SKRIPSI yaitu :

Pengaruh Laba bersih dan komponen-komponen akrual terhadap analisis operasi dimana mendeteksi pada perusahaan dengan yang terdaftar di BEI

Analisis penerapan keputusan atas laporan keuangan perusahaan yang mengalami kebangkrutan di BEI

Berdasarkan hasil pertemuan dengan program studi maka ditetapkan calon pembimbing yaitu:

Nama Pembimbing: Dra. Fatmawarni, MM (T.M.M)

Hasil survey & kunjungan ke perusahaan/tempat penelitian serta proses pembimbing dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Penerapan sistem anggaran yang digunakan pada dinas energi dan sumber daya mineral provinsi Sumatera Utara masih belum dikatakan baik dan efisien karena tingkat efisien lebih dari 100%
2. Tingkat efisien anggaran Belanda lansung dan Belanda tidak lansung mengalami nilai turu

Sehingga demikian judul yang disetujui bersama dosen pembimbing adalah:

ANALISIS PENERAPAN REALISASI ANGERAN BELANDA LANGSUNG DAN BELANDA TIDAK LANGSUNG PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA UTARA

Agenda : 2017

Ketua/ Sekretaris Jurusan

(FIRMANI SARAETH S.P., M.Si)

Pemohon

(MEGA AULIA)

Dikethuai Oleh Pembimbing

(Dra. Fatmawarni, M.M)

Proposal Penelitian harus diAgendakan paling lama 1 (Satu) bulan setelah di Paraf oleh program studi Seminar Proposal Paling lama 1 (Satu) bulan setelah judul di Agendakan.



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 20 Januari 2018

Kepada Yth.
Bapak Dekan
Fakultas Ekonomi
Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara

Bismillah (Arabic calligraphy)

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : M E G A A U L I A

NPM : 1 4 0 6 1 7 0 6 9 1

Tempat/Tgl. Lahir : M E D A N 0 2 M E I 1 9 9 5

Program Studi : Akuntansi

Nama Mahasiswa : I L M P E R K A T A G A N K R A K A T
A U N G 2 7 0 G A N G H I D A Y A

Tempat Penelitian : D I N A S E N E R G I D A N S U M B
E R D A Y A M I N E R A L S U M A T
R A A U T A R A

Alamat Penelitian : I L M S E T I A B U D I P A S A R U
N O 4 T A N J U N E S A R I M E D
A N

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan Izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan
identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.
Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:
1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan
Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.

Diketahui:
Ketua Jurusan / Sekretaris

Handwritten signature of Zultra Hanum SE, Msi

( Zultra Hanum SE, Msi )

Wassalam
Pemohon

Handwritten signature of MEGA AULIA

( MEGA AULIA )



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : MEGA AULIA  
N.P.M : 1405170691  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN  
Judul Proposal : ANALISIS REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA UTARA

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
30/1-2018	Fenomena hus jelas		
	Batasan masalah		
	Rumusan		
	Tujuan		
	Kerangka konsep.		
	Tabel waktu penelitian		
	Teknik analisis data.		
31/1-2018	Rumusan masalah		
	Kerangka Konsep		
	Definisi operasional		
	Instrumen penelitian		
	Analisis data		
	daftar pustaka.		
	pedoman penulisan diura & di sebaikkan		
7/2-2018	Tabulasi data		
8/2-2018	Acc selesai bimbingan		

Pembimbing Proposal

Dra. FATMAWARNI, MM

Medan, Januari 2018  
Diketahui /Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
 Jl. Kapt. Mughtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini JUM'AT, 23 Februari 2018 telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi dengan agenda sebagai berikut :

Nama : MEGA AULIA  
 N.P.M. : 1405170691  
 Tempat / Tgl.Lahir : MEDAN, 02 MEI 1995  
 Alamat Rumah : JL.PERBATASAN GG.HIDAYAH NO.27 D  
 Judul Proposal : ANALISIS REALISASI ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA UTARA

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
	Judul disesuaikan
	Identifikasi masalah - rumusan masalah - tujuan penelitian
	tersebut kerangka konseptual berfikir teknik analisis data
	Daftar Pustaka, sistematika penulisan
Keputusan	Perbaikan Minor Seminar Ulang Perbaikan Mayor

Medan, 23 Februari 2018

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Pembimbing

DRA.FATMAWANI, MM

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembanding

HJ.DAHRANI, SE, M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



### PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari JUM'AT, 23 Februari 2018 menerangkan bahwa:

Nama : MEGA AULIA  
N.P.M. : 1405170691  
Tempat / Tgl.Lahir : MEDAN, 02 MEI 1995  
Alamat Rumah : JL.PERBATASAN GG.HIDAYAH NO.27 D  
JudulProposal : ANALISIS REALISASI ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG  
PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI  
SUMATERA UTARA

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Dr. Fatmawati, Mui* *Dr. B.*

Medan, 23 Februari 2018

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Pembimbing

DRA.FATMAWANI, MM

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembanding

HJ.DAHRANI, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui  
Dekan

H.JANURI, SE, MM. M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : MS /II.3-AU/UMSU-05/ C / 2018 Medan, 12 Jumadil Awal 1439 H  
Lampiran : - 29 Januari 2018M  
Perihal : IZIN RISET

Kepada :  
Yth. Bapak / Ibu Pimpinan  
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SUMUT  
Jln. Setia Budi Psr II No. 84 Medan  
Di.-  
Tempat.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : MEGA AULIA  
NPM : 1405170691  
Semester : VIII (Delapan)  
Jurusan : Akuntansi

Demikian lah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikaum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan



H. JANURI, SE, MM, M.Si.

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Mahasiswa
3. Peringgal.



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
Jl. Setia Budi Psr. II No. 84 Tanjung Sari - Medan

Facsimile (061) 8214733

Telepon (061) 821 3533

Kode Pos - 20132

Medan, 30 Januari 2018

Nomor : 420/54 /DESDM/2018  
Tgl :  
Referensi :  
Perihal : Permohonan Izin Riset

KepadaYth,  
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di-

Medan

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Nomor : 47/IL.3-AU/UMSU-05/F/2017 tanggal 13 November 2017, perihal : Permohonan Izin Riset, maka pada prinsipnya kami **tidak keberatan dan menerima** mahasiswa/i Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang namanya tersebut dibawah ini :

N P M : 1405170691

N a m a : MEGA AULIA

Jurusan : AKUTANSI

Topik : "Analisa Kebijakan Akuntansi Aktiva Tetap Pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara".

Untuk melaksanakan Riset pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara.

Mahasiswa/i yang namanya tersebut diatas dalam melaksanakan Riset harus mentaati segala peraturan yang berlaku pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Plt. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI SUMATERA UTARA



J. ZUBAIDI, M.Si

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19630822 199003 1 004





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 1203 /II.3-AU/UMSU-05/F/2018  
 Lamp. : -  
 Hal : MENYELESAIKAN Riset

Medan, 18 Djumadil Akhir 1439 H  
 06 Maret 2018 M

Kepada :

Yth, Bapak / Ibu Pimpinan  
 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA UTARA  
 di  
 Tempat.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpinan, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian Program Studi Strata Satu ( S1 ) di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : MEGA AULIA  
 N P M : 1405170691  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Program Studi : Akuntansi  
 Judul Skripsi : ANALISIS FUNGSI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SEBAGAI ALAT PENILAIAN KINERJA PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA UTARA

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Dekan ✓

H. JANURI, SE, MM, M.Si

Tembusan :



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
 Jl. Setia Budi Psr. II No. 84 Tanjung Sari - Medan

Facsimile (061) 8214733

Telepon (061) 821 3533

Kode Pos - 20132

Medan, 12 Maret 2018

Nomor : 420 / 744 / DESDM/2018  
 Tanggal :  
 Inspirasi :  
 Perihal : Telah Menyelesaikan Riset  
 Pada Dinas ESDM Provsu

KepadaYth,  
 Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
 di-  
 M e d a n

Berdasarkan surat dari Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara, Nomor : 420/53/DESDM/2018 tanggal 9 Januari 2018 perihal : Permohonan Izin Riset. Tindak lanjut dari surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Nomor : 1283/11.3-AU/UMSU-05/F/2017 tanggal 13 November 2017. Maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara menyatakan mahasiswa/i yang namanya tersebut dibawah ini :

No.	N A M A	N P M	PROGRAM STUDI
1.	MEGA AULIA	1405170691	AKUTANSI

Telah melaksanakan/menyelesaikan Riset pada Dinas Energi dan Sumber Daya Minera Provinsi Sumatera Utara.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian.

An. Plt KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 PROVINSI SUMATERA UTARA  
 SEKRETARIS

  
**DINAS ESDM**  
 H. Indra Ginting, SH  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 196103211986021002



terpercaya

surat ini agar disebutkan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**PENETAPAN PROYEK PROPOSAL  
MAKALAH / SKRIPSI MAHASISWA  
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

**NOMOR : 1204/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2018**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan,  
berdasarkan Surat Persetujuan Ketua Jurusan AKUNTANSI, Tanggal **23 FEBRUARI 2018**  
Menetapkan Risalah Makalah / Skripsi :

Nama : MEGA AULIA  
N P M : 1405170691  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : ANALISIS FUNGSI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA  
TIDAK LANGSUNG SEBAGAI ALAT PENILAIAN KINERJA PADA DINAS  
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA UTARA  
Pembimbing : **Dra. FATMAWARNI, MM**

Dengan demikian di izinkan menulis Risalah / Makalah / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Risalah / Makalah / Skripsi dengan ketentuan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara – Medan.
2. **Proyek Proposal / Skripsi** dan tulisan dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **06 MARET 2019**

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : MEDAN  
Pada Tanggal : 18 Djumadil Akhir 1439 H  
06 Maret 2018 M



Dekan ✓

**H. JANURI, SE, MM, M.Si**

Tembusan :  
1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.  
2. Peninggal

